

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **1.1. Latar Belakang**

Pada era globalisasi ini perkembangan organisasi sektor publik yang semakin pesat menuntut pemerintah agar melakukan kinerja yang baik dalam melaksanakan tugas dan tanggungjawabnya, baik dari segi intern yaitu meningkatkan kinerja yang optimal dan segi eksternal yaitu adanya tuntutan masyarakat yang menghendaki, agar pemerintah daerah mampu menciptakan tujuan masyarakat daerah yang sejahtera.

Kinerja pemerintah daerah didefinisikan sebagai hasil kerja seorang pekerja, sebuah proses manajemen atau suatu organisasi secara keseluruhan, dimana hasil kerja tersebut harus dapat ditunjukkan buktinya secara konkrit dan dapat diukur (dibandingkan dengan standar yang telah ditentukan). (Sedarmayanti, 2011 : 260).

Kinerja pemerintah daerah adalah hasil atau tingkat keberhasilan suatu kinerja pemerintah daerah dalam menjalankan tugasnya secara keseluruhan sesuai dengan tujuan yang sebelumnya telah direncanakan dalam periode tertentu. Penentuan tujuan adalah proses menentukan tingkat performa yang spesifik. Tujuan berfungsi sebagai motivator yang menyebabkan orang-orang membandingkan kapasitas mereka saat ini yang diperlukan untuk mencapai suatu tujuan. Tujuan yang spesifik dan sulit dengan umpan balik akan menghasilkan kinerja yang lebih tinggi. Artinya bahwa tujuan yang spesifik akan meningkatkan kinerja, tujuan yang sulit ketika diterima akan menghasilkan kinerja yang lebih tinggi dibanding tujuan yang mudah dan umpan balik akan menghasilkan kinerja yang lebih tinggi dari pada tanpa umpan balik (Sunyoto dan Burhanuddin, 2011 : 34).

Kinerja memang telah menjadi sorotan penting dalam seluruh tahapan penyelenggaraan baik di pemerintah pusat maupun di pemerintah daerah. Kinerja pemerintah saat ini sering dinilai tidak produktif, tidak efisien, rendah kualitas, miskin inovasi dan kreativitas. Dalam hal evaluasi kinerja saja hingga saat ini belum tersedia payung hukum yang menjadi dasar dan pedoman penyusunan dokumen evaluasi kinerja pemerintah daerah. Selain itu minimnya jumlah dan kualitas pengelolaan kebijakan pemerintah daerah menjadi salah satu penyebab kurang berkualitaskannya produk kebijakan yang dihasilkan. Sehingga peningkatan pelayanan dan kesejahteraan kepada masyarakat sebagai salah satu visi/misi dan tujuan pemerintah daerah akan sulit tercapai (Ira Halidayanti, 2014).

Berdasarkan hasil evaluasi Kementerian PAN-RB terhadap Laporan Akuntabilitas Instansi Pemerintah (LAKIP) tahun 2019, Kabupaten Subang Perolehan predikat “B” dalam penilaian tersebut masih terdapat kendala-kendala dan permasalahan yang dihadapi. Salah satunya adalah terdapat target kinerja yang belum tercapai dengan sempurna, yaitu terwujudnya penyelenggaraan pemerintah yang baik dan bersih dengan 8 indikator kinerja yang memperoleh kategori tidak tercapai dalam bidang : 1. Persentase Ruas Jalan Yang Dilengkapin Kelengkapan Jalan 2. Persen Ketersediaan Rumah Layak Huni 3. Harapan lama sekolah (HLS) 4. Rata-rata Lama Sekolah (RRLS) 5. Tingkat Pengangguran Terbuka 6. Nilai Investasi PMDN 7. Jumlah Kunjungan Wisatawan 8. Indeks Resiko Bencana.

Fenomena lain yaitu 2021 Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) menyoroti piutang Pemkab Subang di pihak ketiga. Masalah ini menjadi catatan BPK terhadap keuangan daerah Kepala Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Subang Ahmad Sobari mengatakan sehubungan dengan akan diperiksanya Laporan Keuangan Pemerintah Kabupaten Subang oleh BPK, tercantum dalam laporan tersebut piutang pajak yang menjadi catatan BPK dari tahun ke tahun. Pada tahun sebelumnya, BPK sudah mengingatkan jika piutang tidak ada progres akan berpengaruh kepada kualitas laporan keuangan pemerintah daerah yang sudah berturut-turut

Wajar Tanpa Pengecualian (WTP). Penilaian WTP salah satunya dinilai dari kesungguhan upaya pemerintah daerah terhadap persoalan piutang pajak.

<http://www.tintahijau.com/pemerintahan/eksekutif/25867>)

Fenomena lainnya pada tahun 2021 Persoalan sampah yang dihadapi Kabupaten Subang diklaim salah satunya lantaran masa transisi pemindahan dari Tempat Pembuangan Akhir (TPA) Panembong ke TPA Jalupang. "Pemerintah Kabupaten Subang saat ini sedang berupaya keras agar permasalahan sampah dapat segera teratasi," ujar Bupati Subang, Ruhimat dikutip dari keterangan tertulis yang diterima Kompas.com, Rabu (2/6/2021). lalu, Ruhimat meninjau TPA Jalupang. Penggunaan lahannya baru seluas 4 hektar dari yang direncanakan 14 hektar. Sampah-sampah tersebut berasal dari berbagai daerah di Subang, termasuk industri. "Sehingga akses jalan belum begitu kondusif serta terjadi penumpukan dalam satu area," kata dia. Ruhimat berharap agar masyarakat sekitar dapat memanfaatkan area TPA sebagai tempat yang produktif sebagai sumber penghasilan. Juga bersama-sama menjaga area TPA jalupang agar aman, tertib dan juga kondusif.

<https://regional.kompas.com/read/2021/06/02/134937778/masalah-tumpukan-sampah-bupati-subang-kami-upayakan-segera-teratasi?page=all>)

Berbagai fenomena di atas menunjukkan bahwa kinerja instansi pemerintah subang belum optimal, yang berkaitan dengan hasil (*outcome*), keluaran (*output*) dan Manfaat (*benefit*).

Banyak faktor yang mempengaruhi kinerja pemerintah daerah diantaranya *Good government governance*. Terdapat pengaruh *good government governance* terhadap kinerja pemerintah (Claraini (2017), *Good government governance* merupakan wujud dari penerimaan akan pentingnya suatu perangkat atau tata kelola yang baik untuk mengatur hubungan, fungsi dan kepentingan berbagai pihak dalam urusan bisnis maupun layanan

publik. Melaksanakan *good government governance* yang baik tentu kinerja suatu organisasi akan berjalan baik dan sesuai dengan tujuan dari organisasi tersebut. Hal ini dapat diberikan kesimpulan bahwa apabila pelaksanaan *good government governance* ditingkatkan secara otomatis dapat meningkatkan kinerja organisasi. (Budi Mulyawan dalam Ira Amelia, dkk. 2014)

Keberhasilan kinerja pemerintah daerah juga tidak terlepas dari peran sistem pengendalian intern pemerintah. Sistem pengendalian intern merupakan salah satu faktor yang dianggap memiliki pengaruh terhadap kinerja pemerintah daerah (Nur Azlina dan Ira Amelia (2014) Sistem pengendalian intern pemerintah meliputi struktur organisasi, metode dan ukuran-ukuran yang di koordinasikan untuk menjaga kekayaan organisasi, mengecek ketelitian dan keterandalan dan akuntansi, mendorong efesiensi, dan dipatuhinya kebijakan pimpinan. Pelenyelenggaraan kegiatan di pemerintah daerah, dimulai dari Perencanaan, Pelaksanaan, Pengawasan, sampai dengan pertanggungjawaban, harus dilaksanakan secara tertib, terkendali, serta efektif dan efisien. Untuk mewujudkannya dibutuhkan suatu sistem yang dapat memberikan keyakinan memadai bahwa pelenyelenggaraan kegiatan telah dilaksanakan sesuai dengan rencana dan dapat mencapai tujuan. (Chici, 2017).

Penilaian kinerja pemerintah baik pusat maupun daerah sangat penting dilakukan. Hal ini bertujuan untuk meningkatkan kualitas pelayanan di pemerintah agar hasil kerja lebih baik dari sebelumnya (Tri Putri Lestari (2015).

Penelian ini merupakan replikasi dari penelitian yang dilakukan oleh I Gede Agus Sudiarsana Putra dan I Made Pande Dwiana Putra. Dengan judul “Pengaruh *Good Governance* dan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah pada Kinerja Pemerintah Daerah”. Perbedaan penelitian ini dengan penelitian sebelumnya adalah lokasi penelitian, dimensi penelitian dan tahun penelitian.

Berdasarkan latar belakang di atas, maka penulis tertarik melakukan penelitian dengan judul **“Pengaruh *Good Government Governance* dan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) Terhadap Kinerja Pemerintah Daerah (Studi Pada Pemda Kabupaten Subang)”**.

### **1.2. Rumusan Masalah**

Berdasarkan uraian diatas, maka pada penelitian ini akan dirumuskan masalah sebagai berikut:

1. Bagaimana *Good Government Governance* pada Pemerintah Daerah Kabupaten Subang.
2. Bagaimana Sistem Pengendalian Intern Pemerintah pada Pemerintah Daerah Kabupaten Subang.
3. Bagaimana Kinerja Pemerintah Daerah pada Pemerintah Daerah Kabupaten Subang.
4. Seberapa besar pengaruh *Good Government Governance* dan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah pada Pemerintah Daerah Kabupaten Subang secara simultan
5. Seberapa besar pengaruh *Good Government Governance* dan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah pada Pemerintah Daerah Kabupaten Subang secara persial

### **1.3 Tujuan Penelitian**

Berdasarkan latar belakang dan rumusan masalah yang telah diuraikan, maka tujuan yang ingin dicapai oleh penulis dari penelitian ini adalah:

1. Untuk mengetahui pelaksanaan *Good Government Governance* pada pemda kab.subang Pemerintah Daerah Kabupaten Subang.
2. Untuk mengetahui Sistem Pengendalian Intern Pemerintah pada Pemerintah Daerah Kabupaten Subang.

3. Untuk mengetahui Kinerja Pemerintah Daerah pada Pemerintah Daerah Kabupaten Subang.
4. Untuk mengetahui besarnya pengaruh *Good Government Governance*, Sistem Pengendalian Intern Pemerintah pada Pemerintah Daerah Kabupaten Subang secara simultan.
5. Untuk mengetahui besarnya pengaruh *Good Government Governance*, Sistem Pengendalian Intern Pemerintah pada Pemerintah Daerah Kabupaten Subang secara persial.

#### **1.4 Kegunaan Penelitian**

Penelitian ini dilakukan guna memberikan manfaat bagi berbagai pihak baik secara langsung maupun tidak langsung. Adapun kegunaan yang diharapkan dalam penelitian ini antara lain:

##### 1. Kegunaan Teoritis

Diharapkan dapat menambah wawasan pembaca tentang pengaruh *good government governance*, sistem pengendalian intern pemerintah terhadap kinerja Pemerintah Daerah pada kabupaten subang atau rujukan tambahan untuk penelitian selanjutnya mengenai bidang kajian yang diteliti.

##### 2. Kegunaan Praktis

###### a. Bagi penulis

Hasil penelitian ini untuk memenuhi persyaratan sidang skripsi guna memperoleh gelar sarjana ekonomi di Universitas Pasundan Bandung.

###### b. Bagi Pemerintah Daerah

Bagi pemerintah daerah penelitian ini diharapkan dapat dipergunakan sebagai bahan pertimbangan bagi pemerintah daerah dalam bidang akuntansi sektor publik berkaitan dengan *Good Government Governance* dan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah, dalam rangka meningkatkan kinerja pemerintah daerah.

c. Bagi pihak lain

Diharapkan penelitian ini dapat digunakan sebagai bahan referensi dalam melakukan penelitian dalam bidang Sistem Akuntansi mengenai *Good Government Governance*, Sistem Pengendalian Intern, terhadap Kinerja Pemerintah Daerah, serta memperluas wawasan pengetahuan dan juga sumber pemikiran yang bermanfaat dalam membangun bangsa yang lebih baik di masa yang akan datang.

**1.5. Lokasi dan waktu penelitian**

Penelitian ini dilaksanakan pada Pemerintah daerah kabupaten Subang Pasirkareumbi, Kecamatan Subang, Pasirkareumbi, Kec. Subang, Kabupaten Subang, Jawa Barat 41215 Jawa Barat – Indonesia. Waktu penelitian dimulai bulan Mei sampai dengan selesai.

## BAB II

### KAJIAN PUSTAKA, KERANGKA PEMEKIRAN DAN HIPOTESIS

#### 2.1. Kajian Pustaka

##### 2.1.1. *Good Government Governance*

##### 2.1.1.1. Definisi *Good Government Governance*

*Good government governance* mendasarkan suatu konsep yang mengacu kepada proses pencapaian keputusan dan pelaksanaannya dapat dipertanggungjawabkan secara bersama sebagai suatu yang dicapai oleh pemerintah, warga negara, dan sektor swasta bagi penyelenggaraan pemerintahan dalam suatu negara.

Menurut Sedarmayanti (2012:276) pengertian *Good government governance* sebagai berikut:

“*Good government governance* adalah penyelenggaraan pemerintahan negara yang solid dengan tanggung jawab, serta efektif dan efisien dengan menjaga kesinergian interaksi yang konstruktif diantara domain-domain negara sektor swasta dan masyarakat.”

Menurut World Bank dalam Mustafa (2013:187):

“*Good government governance* sebagai suatu penyelenggaraan manajemen pembangunan yang solid dan bertanggung jawab serta sejalan dengan prinsip demokrasi dan pasar yang efisien, penghindaran salah alokasi dana investasi, dan pencegahan korupsi. Baik secara politik maupun administratif, menjalan disiplin anggaran serta penciptaan *legal and political framework* bagi tumbuhnya aktivitas usaha.”

Menurut Elahi dalam Momma Yousaf (2015):

“*Good government governance is defined as a process as well as a structure that guide the political and socio economic relationships and it refers to several characteristics or indicators such as: participation, rule of law, transparency, responsiveness and accountability. Citizen’s perspective of good governance is the improvemen of the structure of public service and administration.*”



Dari pernyataan diatas jelaslah bahwa *Good government governance* mendefinisikan sebagai proses serta struktur yang membimbing politik dan hubungan sosial ekonomi dan mengacu pada beberapa karakteristik atau indikator seperti: partisipasi, supremasi hukum, transparansi, responsive dan akuntabilitas. Perspektif warga negara dari *good government governance* adalah perbaikan struktur pelayanan publik dan administrasi.

Istilah *governance* tidak hanya berarti pemerintahan sebagai suatu kegiatan, tetapi juga mengandung arti perusahaan, pengelolaan, pengarahan, pembinaan penyelenggaraan dan bisa juga diartikan pemerintahan. Oleh karena itu tidak mengherankan apabila terdapat istilah *public governance*, *private governance*, *corporate governance*, dan *banking governance*. Secara sederhana, *good governance* pada umumnya diartikan sebagai pengelolaan pemerintahan secara baik.

#### **2.1.1.2. Prinsip-Prinsip Good Government Governance**

Karakteristik dan prinsip-prinsip *good government governance*, prinsip dasar yang melandasi perbedaan antara konsepsi pemerintahan (*governance*) dengan pola pemerintahan yang tradisional terletak pada adanya tuntutan yang demikian kuat agar peranan pemerintah dikurangi dan peranan masyarakat (termasuk dunia usaha dan organisasi non pemerintah) semakin ditingkatkan dan semakin terbuka aksesnya.

Menurut Fatmualiyah (2012), Prinsip-prinsip *good government governance*:

“Suatu karakteristik atau ukuran pokok pelaksanaan penyelenggaraan pemerintah yang baik. adapun sembilan pokok karakteristik *good governance*, yaitu akuntabilitas, transparansi, penegakan hukum, efektivitas, partisipasi, responsivitas, keadilan, orientansi dan strategi visi.”

Menurut Rewansyah (2010:99) menetapkan tujuh asas penyelenggaraan negara yang baik, yaitu :

1. Asas Kepastian Hukum
2. Asas tertib penyelenggaraan negara
3. Asas Kepentingan umum
4. Asas Keterbukaan
5. Asas proporsionalitas
6. Asas profesionalitas
7. Asas akuntabilitas

Berikut ini penjelasan dari tujuh asas tersebut:

1. Asas Kepastian Hukum, yaitu asas yang mengutamakan landasan peraturan perundang-undangan, kepatutan, dan keadilan dalam dalam setiap kebijakan penyelenggaraan negara.
2. Asas tertib penyelenggaraan negara, yaitu asas yang mengutamakan keteraturan, keserasian dan keseimbangan dalam pengendalian dan penyelenggara negara.
3. Asas Kepentingan umum, yaitu asas yang mendahulukan kesejahteraan umum dengan aspiratif, akomodatif dan selektif.
4. Asas keterbukaan, yaitu asas yang membuka diri terhadap hak masrakat untuk memperoleh informasi yang benar, jujur dan tidak diskriminatif tentang penyelenggaraan negara dengan tetap memperhatikan perlindungan atas hak asasi pribadi, golongan dan rahasia negara.

5. Asas proporsionalitas, yaitu asas yang mengutamakan keseimbangan antara hak dan kewajiban penyelenggaraan negara.
6. Asas profesionalitas, yaitu asas yang mengutamakan keahlian yang berlandaskan kode etik dan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
7. Asas akuntabilitas, yaitu asas dimana setiap kegiatan dan hasil akhir dari kegiatan penyelenggaraan negara harus dapat dipertanggungjawabkan kepada masyarakat atau rakyat sebagai pemegang kedaulatan tertinggi negara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Menurut Sedarmayanti (2012:289) bahwa ada empat prinsip utama dalam pelaksanaan good government governance, yaitu :

1. Akuntabilitas (pertanggungjawaban)
2. Transparansi (keterbukaan)
3. Partisipasi (melibatkan masyarakat)
4. Superemasi Hukum (aturan hukum)

Berikut penjelasan dari 4 prinsip good government governance tersebut:

1. Akuntabilitas (pertanggungjawaban), yaitu adanya kewajiban bagi aparatur pemerintah untuk bertindak selaku penanggung jawab atas segala tindakan dan kebijakan yang ditetapkan.
2. Transparansi (keterbukaan) karena pemerintahan yang baik akan bersifat transparansi terhadap rakyatnya, baik ditingkat pusat maupun daerah.
3. Partisipasi (melibatkan masyarakat terutama aspirasinya), yaitu menghendaki terbukanya kesempatan bagi rakyat untuk mengajukan tanggapan dan kritik terhadap

serta pemerintah yang dinilainya tidak baik. Pemerintah yang baik juga menyediakan sarana publik untuk menampung aspirasi masyarakat terkait pelaksanaan tugas pemerintah.

4. Supremasi Hukum (aturan hukum) pemerintahan yang baik mempunyai karakteristik berupa jaminan kepastian hukum dan rasa keadilan masyarakat terhadap setiap kebijakan publik yang ditempuh.

Dilihat dari uraian prinsip-prinsip tata pemerintahan yang baik tersebut, tampak bahwa prinsip-prinsip dimaksud saling memperkuat dan tidak dapat berdiri sendiri. Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa wujud *good government governance* adalah penyelenggaraan negara yang solid dan bertanggung jawab, serta efisien dan efektif dengan menjaga kesinergian interaktif yang konstruktif diantara domain-domain negara, sektor swasta dan masyarakat. Oleh karena *good government governance* meliputi sistem administrasi negara, maka upaya mewujudkan *good government governance* atau tata pemerintahan yang baik juga merupakan upaya melakukan penyempurnaan pada sistem administrasi negara yang berlaku pada suatu negara secara menyeluruh.

#### **2.1.1.3. Tujuan Good Government Governance**

Tujuan dari *Good government governance* menurut Amin Widjaja Tunggal (2012:40) adalah :

1. Tercapainya sasaran yang telah ditetapkan,
2. Aktiva pemerintahan dijaga dengan baik,
3. Pemerintahan menjalankan tugasnya dengan baik dan sehat,
4. Kegiatan pemerintahan dilakukan dengan transparan.

Penerapan pelaksanaan *Good government governance* secara optimal akan mampu meningkatkan kinerja pemerintahan yang ada, dan akan memberikan nilai tambah bagi semua pihak yang terkait. Serta tujuan *good government governance* adalah penerapan sistem tata kelola pemerintahan yang baik (*good government governance*) yang diharapkan dapat

meningkatkan nilai tambah bagi semua pihak dalam jangka panjang dan dapat melindungi kesejahteraan masyarakat.

#### **2.1.1.4. Manfaat Good Government Governance**

Penerapan *good government governance* memiliki peran yang besar dan manfaat yang dapat membawa perubahan positif baik pemerintah daerah, pemerintah pusat maupun masyarakat umum.

Dengan melaksanakan *good government governance* menurut Aming Widjaja Tunggal (2013:24) ada beberapa manfaat yang akan diperoleh, antara lain yaitu:

1. Meminimalkan *Agency Cost*.
2. Meningkatkan Kinerja Pemerintahan
3. Memberikan Citra Pemerintahan.

Penjelasan dari beberapa manfaat yang akan diperoleh, adalah sebagai berikut:

##### 1. Meminimalkan *Agency Cost*

Biaya-biaya yang timbul akibat dari pendelegasian wewenang. Biaya ini bisa berupa kerugian yang timbul karena pemerintah telah menggunakan sumber daya yang ada untuk kepentingan pribadi sehingga dapat menimbulkan kerugian.

##### 2. Meningkatkan Kinerja Pemerintah

Suatu pemerintahan yang dikelola dengan baik dan dalam kondisi pemerintahan yang sehat akan menarik simpati masyarakat untuk ikut serta mau berperan aktif dan berpartisipasi dalam kegiatan pemerintahan.

##### 3. Memberikan Citra Pemerintahan

Citra pemerintahan merupakan faktor penting sangat erat kaitannya dengan kinerja dan keberadaan pemerintah dimata masyarakat dan lingkungannya.

Menurut sedarmayanti (2012) manfaat *good government governance* sebagai berikut:

- 1.Meningkatkan efisiensi dan produktivitas dalam pengelolaan keuangan desa.
- 2.Meningkatkan kepercayaan publik atau masyarakat.
- 3.Menjaga keberlangsungan pemerintah.

Manfaat dari penerapan *good government governance* tentunya sangat berpengaruh bagi pemerintahan, dimana manfaat *good government governance* ini bukan hanya untuk saat ini tetapi juga dalam jangka panjang dapat menjadi pendukung kembangnya dalam pemerintahan saat ini. Selain bermanfaat meningkatkan citra pemerintahan dimata masyarakat, hal ini tentunya juga menjadi nilai tambah pemerintah dalam meningkatkan kinerja pemerintahan untuk menghadapi permasalahan yang ada dalam pemerintah.

#### **2.1.1.5.Dasar Hukum Penerapan *Good Government Governance* di Indonesia.**

Di Indonesia prinsip *good governance* tertuang dalam Pasal 20 undang-undang nomor 32 tahun 2004 tentang pemerintah daerah. Yang mengatur tentang penyelenggaraan pemerintahan yang wajib dijalankan dengan asas umum penyelenggaraan pemerintahan.

Asas umum penyelenggaraan pemerintahan sesuai dengan Pasal 20 undang-undang nomor 32 tahun 2004 tentang pemerintah daerah, yaitu:

1. Asas kepastian hukum
2. Asas kepentingan umum
3. Asas tertib penyelenggaraan pemerintah
4. Asas keterbukaan
5. Asas proporsionalitas
6. Asas profesional

7. Asas akuntabilitas
8. Asas efisiensi dan efektifitas

Berikut ini penjelasan dari delapan asas tersebut:

1. Asas kepastian hukum; Setiap tindakan dilakukan oleh pemangku kepentingan haruslah berdasarkan atas hukum yang berlaku.
2. Asas tertib penyelenggaraan negara; Penyelenggaraan negara sesuai dengan aturan serta visi dan misi yang ditetapkan.
3. Asas kepentingan umum; Setiap kebijakan yang dikeluarkan oleh pemerintah wajib mendahulukan kepentingan umum dibandingkan kepentingan kelompok atau golongan.
4. Asas keterbukaan; Masyarakat dapat mengakses atau melihat hasil kegiatan dan tindakan pemerintah yang dikerjakan oleh pemerintah. Sehingga masyarakat dapat menjadi pengawas bagi pemerintah.
5. Asas proporsionalitas; Seluruh tindakan pemerintah maupun para penegak hukum haruslah ada keseimbangan antara hak dan kewajibannya. Sehingga tidak merugikan masyarakat yang bersangkutan.
6. Asas profesionalitas; Mengedepankan tugas dan kewajiban sesuai dengan tugas dan pokok dan fungsi masing-masing lembaga pemerintah.
7. Asas akuntabilitas; Setiap tindakan dan kinerja pemerintah, wajib untuk dipertanggung jawabkan. Baik kepada masyarakat maupun kepada lembaga yang berada di atasnya.
8. Asas efisiensi dan efektivitas; Efektifitas dimaksudkan supaya setiap keputusan yang diambil haruslah tepat guna dan berdaya bagi masyarakat, sedangkan efisiensi,

berorientasi pada minimalisasi penggunaan sumber daya untuk mencapai hasil kerja yang terbaik (baik itu sumber daya manusia maupun sumberdaya lainnya yang dimiliki pemerintah daerah). Adanya otonomi daerah, merupakan perwujudan asas efektivitas dan efisiensi. Sebab, adanya otonomi daerah, maka rantai birokrasi lebih cepat, efektif dan efisien.

Upaya menjamin pelayanan publik yang baik, yang telah ditetapkan oleh pemerintah pusat diwujudkan dengan berlakunya:

- 1.UU Pelayanan Publik dan UU Keterbukaan Informasi Publik.
- 2.Pada 18 Juli 2009 pemerintah telah memberlakukan UU Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik, dan UU Nomor 14 tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik yang diberlakukan mulai 30 April 2010.
- 3.Peraturan pemerintah No. 101 Tahun 2000 tentang pemerintahan yang baik (goodgovernance).
- 4.TAP MPR/XI/MPR/1999 Tentang penyelenggaraan negara yang bersih dan bebas korupsi kolusi dan nepotisme.
- 5.UU Nomor 32 Tahun 2004 tentang pemerintah daerah.
- 6.UU Nomor 33 Tahun 2004 tentang perimbangan keuangan pusat dan daerah.
- 7.Pasal 3 UU No. 43/1999 tentang perubahan atas UU No. 8/1974 tentang pokok-pokok kepegawaian.
- 8.UU No.30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan.



### 2.1.1.6. Tantangan Dalam Penerapan *Good Government Governance* di Indonesia

Menurut Asmawi Rewans (2010):

“Tantangan penerapan *good governance* di Indonesia, yaitu terjadinya krisis multidimensi, yang bersifat *vicious crises*, yakni terjadinya Krisis moral Krisis hukum, Krisis sosial, Krisis politik, Krisis agama, Krisis budaya dan Krisis kepercayaan.”

Agar lebih jelas, berikut ini penjelasan dari berbagai krisis yang ada:

#### 1. Krisis ekonomi

Semakin banyaknya aksi kejahatan dengan berbagai modus dan motif.

#### 2. Krisis moral

Semakin banyaknya perilaku menyimpang dan di luar batas moral yang dilakukan mulai dari anak sekolah sampai anggota DPR dan para pejabat di negeri ini.

#### 3. Krisis hukum

Semakin maraknya perdagangan narkoba akibat dari tidak tegasnya pemimpin negeri ini dalam menangani masalah narkoba.

#### 4. Krisis sosial

Semakin maraknya konflik etnis atau aksi tawuran, baik di kalangan intelektual bahkan terjadi di dalam kampus dan rumah sakit ataupun di lingkungan masyarakat.

#### 5. Krisis politik

Semakin liarnya perilaku politisi yang senantiasa dipertontonkan kepada masyarakat luas melalui berbagai media.

#### 6. Krisis agama

Semakin kurangnya ketakutan manusia Indonesia pada penciptanya. Ini terlihat dari maraknya aksi korupsi, tidak takut berbohong dan tidak peduli pada sesama yang membutuhkan.

## 7. Krisis budaya

Semakin bebasnya dan suksesnya budaya asing masuk dan menracuni sebagai besar anak muda di kota-kota besar, bahkan sampai di pelosok tanah air.

### **2.1.2. Sistem Pengendalian Intern Pemerintah**

#### **2.1.2.1. Pengertian Sistem Intern Pemerintah**

Pengawasan intern merupakan salah satu bagian dari kegiatan pengendalian intern yang memiliki fungsi melakukan penilaian independen atas pelaksanaan tugas dan fungsi instansi pemerintah. Ruang lingkup pengatur pengawasan intern mencakup kelembagaan, lingkup tugas, kompetensi sumber daya manusia, kode etik, audit dan pelaporan.

Menurut PP 60 Pasal 1 ayat (2) tahun 2008 mengenai Sistem Pengendalian Internal Pemerintah disebutkan bahwa:

“Sistem pengendalian intern adalah proses yang integral pada tindakan dan kegiatan yang dilakukan secara terus menerus oleh pimpinan dan seluruh pegawai untuk memberikan keyakinan memadai atas tercapainya tujuan organisasi melalui kegiatan yang efektif dan efisien, keandalan pelaporan keuangan, pengamanan asset negara, dan ketaatan terhadap peraturan perundang- undangan”.

Pengertian sistem pengendalian intern menurut COSO (2013:4) yaitu:

*“Intern control system is a process, effected by an entity’s boar of directors, managemen, and other personnel, designed to providen reasonable assurance regarding the achievemen of objectives relating to operations, reporting, and compliance.”.*

Pernyataa diatas memiliki arti bahwa pengendalian internal adalah suatu proses, yang dipengaruhi oleh entitas dewan direksi, manajemen, dan personel lainnya, yang dirancang untuk memberikan jaminan yang wajar terkait pencapaian tujuan yang berkait dengan operasi, pelaporan, dan kepatuhan.

Menurut Mulyadi (2013 : 164) tentang sistem pengendalian intern, yakni:

“Meliputi stuktur organisasi, metode dan ukuran yang dikoordinasikan untuk menjaga kekayaan organisasi, mengecek ketelitian dan keandalan data akuntansi, mendorong efisiensi dan mendorong dipatuhinya kebijakan manajemen”.

Pengertian sistem pengertian intern menurut Hery (2013 : 159)

“Seperangkat kebijakan dan prosedur untuk melindungi asset atau kekayan perusahaan dari segala bentuk tindakan penyalahgunaan, menjamin tersediaanya informasi akuntansi perusahaan yang akurat, serta memastikan bahwa semua kentuan (peraturan) hukum/undang-undang serta kebijakan manajemen telah dipatuhi atau dijalankan sebagaimana mestinya oleh seluruh karyawan perusahaan”.

#### **2.1.2.2 Tujuan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah**

Sistem pengendalian intern yang dilakukan suatu perusahaan atau organisasi pemerintah untuk mendorong daya efiesien dan efektivitas kinerja perusahaan atau kinerja organisasi pemerintah.

Tujuan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) seperti yang diamanatkan dalam Pasal 2 Ayat (3) adalah sebagai berikut:

“bertujuan untuk memberikan keyakinan yang memadai bagi tercapainya efektivitas dan efisiensi pencapaian tujuan penyelenggaraan pemerintahan negara, keandalan pelaporan keuangan, pengamanan aset negara, dan ketaatan terhadap peraturan perundang-undangan”.

Dalam PP ini ditegaskan bahwa pimpinan organisasi wajib menciptakan dan memelihara lingkungan pengendalian yang menimbulkan perilaku positif dan kondusif untuk menerapkan Sistem Pengendalian Intern (SPI) dalam lingkungan kerjanya (pasal 4), melakukan penilaian risiko (pasal 13), menyelenggarakan kegiatan pengendalian sesuai dengan ukuran kompleksitas dan sifat dari tugas dan fungsi instansi pemerintah yang bersangkutan (pasal 18), mengidentifikasi, mencatat dan mengkomunikasikan informasi dalam bentuk dan waktu yang tepat (pasal 41) dan melakukan pemantauan terhadap penerapan Sistem Pengendalian Intern (SPI) (pasal 41).

Unsur-unsur Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) yang diterapkan di pemerintah menurut Peraturan Nomor 60 Tahun 2008 Pasal 3 Ayat (1) terdiri atas unsur:

“1. Lingkungan pengendalian.

2. Penilaian risiko.

3. Kegiatan pengendalian.

4. Kegiatan pengendalian.

5. Pemantauan.”

### **2.1.2.3 Unsur Sistem Pengendalian Intern Pemerintah**

Agar lebih jelas, berikut ini akan dijelaskan kelima unsur sistem pengendalian internal pemerintah PP No. 60 Tahun 2008 Pasal 4 tersebut:

#### **1. Lingkungan Pengendalian**

Pimpinan instansi pemerintah wajib menciptakan dan memelihara lingkungan pengendalian yang menimbulkan perilaku positif dan kondusif untuk penerapan sistem pengendalian internal dalam lingkungan kerjanya. meliputi:

a. Penegakan integritas dan nilai

Penegakan integritas dan nilai etika sekurang-kurangnya dilakukan dengan:

- a) Menyusun dan menetapkan aturan perilaku;
- b) Memberikan keteladanan pelaksanaan aturan perilaku pada setiap tingkat pimpinan Instansi Pemerintah;
- c) Menegakkan tindakan disiplin yang tepat atas penyimpangan terdapan kebijakan dan prosedur, atau pelanggaran terhadap aturan perilaku;
- d) Menjelakan dan mempertanggungjawabkan adanya intervensi atau pengabaian pengendalian intern; dan
- e) Menghapus kebijakan atau penugasan yang dapat mendorong perilaku tidak etis.

b. Komitmen terhadap kompetensi

Komitmen terhadap kompetensi sekurang-kurangnya dilakukan dengan:

- a) Mengidentifikasi dan menetapkan kegiatan yang dibutuhkan untuk menyelesaikan tugas dan fungsi pada masing-masing posisi dalam Instansi Pemerintah;
- b) Menyusun standar kompetensi untuk setiap tugas dan fungsi pada masing-masing posisi Instansi Pemerintah;
- c) Menyelenggarakan pelatihan dan pembimbing untuk membantu pegawai mempertahankan dan meningkatkan kompetensi pekerjaanya; dan
- d) Memilih pimpinan Instansi Pemerintah yang memiliki kemampuan manajerial dan pengalaman teknis yang luas dalam pengelolaan Instansi Pemerintah.

c. Kepemimpinan yang kondusif

Kepemimpinan yang kondusif sekurang-kurangnya ditunjukkan dengan:

- a) Mempertimbangkan resiko dalam pengambilan keputusan;
- b) Menerapkan manajemen berbasis kinerja;
- c) Mendukung fungsi tertentu penerapan SPIP;
- d) Melindungi atas asset dan informasi dari atas akses dan penggunaan yang tidak sah;
- e) Melakukan interaksi secara intensif dengan pejabat pada tingkatan yang lebih rendah; dan
- f) Merespon secara positif terhadap pelaporan yang berkaitan dengan keuangan, penganggaran, program, dan kegiatan.

d. Pembentukan struktur organisasi yang sesuai dengan kebutuhan sekurang-kurangnya dilakukan dengan:

- a) Menyesuaikan dengan ukuran dan sifat kegiatan Instansi Pemerintah;
- b) Memberikan kejelasan wewenang dan tanggung jawab dalam Instansi Pemerintah;
- c) Memberikan kejelasan hubungan dan jenjang pelaporan intern dalam Instansi Pemerintah;
- d) Memberikan evaluasi dan penyesuaian periodik terhadap struktur organisasi sehubungan dengan perubahan lingkungan strategis; dan
- e) Menetapkan jumlah pegawai yang sesuai, terutama untuk posisi pimpinan.

e. Pendelegasian wewenang dan tanggung jawab yang tepat

Pendelegasian wewenang dan tanggung jawab yang tepat sekurang-kurangnya dilaksanakan dengan memperhatikan hal-hal sebagai berikut:

a) Wewenang diberikan kepada pegawai yang tepat dan sesuai dengan tingkat tanggung jawabnya dalam rangka pencapaian tujuan Instansi Pemerintah;

b) Pegawai yang diberi wewenang memahami bahwa wewenang dan tanggung jawab yang diberikan terkait dengan pihak lain dalam Instansi Pemerintah yang bersangkutan; dan

c) Pegawai yang diberikan wewenang memahami bahwa pelaksanaan wewenang dan tanggung jawab terkait dengan penerapan SPIP.

f. Penyusunan dan penerapan kebijakan yang sehat tentang pembinaan sumber daya manusia

Penyusunan dan penerapan kebijakan yang sehat tentang pembinaan sumber daya manusia sekurang-kurangnya dilaksanakan dengan memperhatikan hal-hal sebagai berikut:

a) Penetapan kebijakan dan prosedur sejak rekrutmen sampai dengan pemberhentian pegawai; dan

b) Penelusuran latar belakang calon pegawai dalam proses rekrutmen.

g. Perwujudan peran aparat pengawasan item pemerintah yang efektif

Perwujudan peran aparat pengawasan item pemerintah yang efektif sekurang-kurangnya dilaksanakan dengan memperhatikan hal-hal sebagai berikut:

- a) Memberikan keyakinan yang memadai atas ketaatan, kehematan, efisiensi, dan efektivitas pencapaian tujuan penyelenggaraan tugas dan fungsi Instansi Pemerintah;
- b) Memberikan peringatan dini dan meningkatkan efektivitas manajemen resiko dalam penyelenggaraan tugas dan fungsi Instansi Pemerintah; dan
- c) Memelihara dan meningkatkan kualitas tata kelola penyelenggaraan tugas dan fungsi Instansi Pemerintah.
- h. Hubungan kerja yang baik dengan instansi pemerintah terkait.

## 2. Penilaian Resiko

Pemimpin instansi pemerintah wajib melakukan penilaian resiko, penilaian resiko terdiri atas:

### a. Identifikasi resiko

Identifikasi resiko sekurang-kurangnya dilaksanakan dengan:

- a) Menggunakan metodologi yang sesuai untuk tujuan instansi pemerintah dan tujuan pada tingkatan kegiatan secara komprehensif;
- b) Menggunakan mekanisme yang memadai untuk mengenali resiko faktor eksternal dan faktor internal;
- c) Menilai faktor lain yang dapat meningkatkan resiko.

### b. Analisis Resiko

Analisis resiko dilaksanakan untuk menentukan dampak dari resiko yang telah diidentifikasi terhadap pencapaian tujuan Instansi Pemerintah.

## 3. Kegiatan Pengendalian



Kegiatan Pengendalian sekurang-kurangnya dilaksanakan dengan:

- a) Reviuw atas kinerja Instansi Pemerintah yang bersangkutan;
- b) Pembinaan sumber daya manusia;
- c) Pengendalian atas pengelolaan sistem informasi;
- d) Pengendalian fisik dan aset;
- e) Penetapan dan reviuw atas indikator dan ukuran kinerja;
- f) Pemisahan fungsi;
- g) Otoritas atas transaksi dan kejadian yang penting;
- h) Pencatatan yang akurat dan tepat waktu atas transaksi dan kejadian;
- i) Pembatasan akses data sumber daya dan pencatatannya;
- j) Akuntabilitas terhadap sumber daya dan pencatatannya; dan
- k) Dokumentasi yang baik atas Sistem Pengendalian Intern serta transaksi dan kejadian penting.

#### 4. Informasi dan Komunikasi

Untuk menyelenggarakan informasi dan komunikasi yang efektif Instansi Pemerintah harus sekurang-kurangnya dilaksanakan dengan:

- a) Menyediakan dan memafaatkan sebagai bentuk untuk sarana komunikasi; dan
- b) Mengelola, mengembangkan, dan memperbarui sistem informasi secara terus menerus.

#### 5. Pemantauan Pengendalian

Pemantauan Sistem Pengendalian Intern dilaksanakan melalui pemantauan berkelanjutan, evaluasi terpisah dan tindak lanjut rekomendasi hasil audit dan review lainnya.

### **2.1.3 Kinerja Pemerintah Daerah**

#### **2.1.3.1. Definisi Kinerja Pemerintah Daerah**

Istilah kinerja berasal dari kata *Job Performance* atau *Actual Performance* (prestasi kerja atau prestasi sesungguhnya yang dicapai seseorang). Kinerja merupakan perwujudan kerja yang dilakukan karyawan yang biasanya dipakai sebagai dasar penilaian terhadap karyawan atau organisasi. Kinerja yang baik untuk organisasi publik maupun non publik.

Menurut Mahsun (2012:25) :

“Kinerja adalah gambaran mengenai tingkat pencapaian pelaksanaan suatu kegiatan atau program atau kebijakan dalam mewujudkan sasaran tujuan, misi dan visi organisasi yang tertuang dalam *strategic planning* suatu organisasi.”

Menurut Sudarmanto (2014:8) :

“Kinerja merupakan catatan hasil yang diproduksi (dihasilkan) atas fungsi pekerjaan tertentu atau aktivitas-aktivitas selama periode waktu tertentu.

Menurut Ira Amalia, dkk. (2014) bahwa :

“Kinerja pemerintah daerah dengan sendirinya merupakan semua hasil-hasil yang didapatkan ataupun hasil-hasil yang dicapai selama berjalannya pelaksanaan otonomi daerah tertentunya untuk mencapai tingkat kinerja yang kita harapkan, dan tentunya ini semua memuat tentang penjabaran sasaran dan program yang telah direncanakan dalam pelaksanaan rencana strategi pemerintah daerah.”

Dari definisi-definisi di atas maka dapat diketahui bahwa kinerja pemerintah daerah adalah gambaran mengenai tingkat pencapaian sasaran ataupun tujuan pemerintah daerah

sebagai keluaran/hasil dari kegiatan/program pemerintah daerah yang mengindikasikan tingkat keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan kegiatan-kegiatan sesuai dengan program dan kebijakan yang ditetapkan.

### **2.1.3.2. Manfaat Pengukuran Kinerja Pemerintah Daerah**

Menurut Mahsun (2012:146) manfaat pengukuran kinerja antara lain:

1. Memastikan pemahaman para pelaksana akan ukuran yang digunakan untuk pencapaian kinerja.
2. Memastikan tercapainya rencana kinerja yang telah disepakati.
3. Memantau dan mengevaluasi pelaksanaan kinerja dan membandingkan dengan rencana kerja serta melakukan tindakan untuk memperbaiki kinerja.
4. Memberikan penghargaan dan hukuman yang objektif atas prestasi pelaksana yang telah diukur sesuai dengan sistem pengukuran kinerja yang telah disepakati.
5. Menjadi alat komunikasi antar bawahan dan pimpinan dalam upaya memperbaiki kinerja organisasi.
6. Mengidentifikasi apakah kepuasan pelanggan sudah terpenuhi.
7. Membantu memahami proses kegiatan instansi pemerintah.
8. Memastikan bahwa pengambilan keputusan dilakukan secara obyektif.
9. Menunjukkan peningkatan yang perlu dilakukan. Mengungkapkan permasalahan yang terjadi.

### **2.1.3.3 Karakteristik Kinerja Pemerintah Daerah**

Menurut Mahsun (2012:148), karakteristik kinerja pemerintah daerah yaitu :

1. Masukan (*Input*)
2. Proses (*Process*)
3. Keluaran (*Output*)
4. Hasil (*Outcomes*)
5. Manfaat (*Benefit*)
6. Dampak (*Impact*)

Adapun penjelasan dari jenis-jenis karakteristik diatas adalah:

1. Masukan (*Input*), adalah segala sesuatu yang dibutuhkan agar pelaksanaan kegiatan dapat berjalan untuk menghasilkan keluaran. Misalnya :

- a. Jumlah dana yang dibutuhkan.
- b. Jumlah pegawai yang dibutuhkan.
- c. Jumlah infrastruktur yang ada.
- d. Jumlah waktu yang digunakan.

2. Proses (*Process*). Dalam indikator ini, organisasi/ instansi merumuskan ukuran kegiatan, baik dari segi kecepatan, ketepatan, maupun tingkat akurasi pelaksanaan kegiatan tersebut. Rambu yang paling dominan dalam proses adalah tingkat efisiensi dan ekonomis pelaksanaan kegiatan organisasi/ instansi. Misalnya :

- a. Ketaatan pada peraturan perundangan.
- b. Rata-rata yang diperlukan untuk memproduksi atau menghasilkan layanan jasa

3. Keluaran (*Output*), adalah sesuatu yang diharapkan langsung dapat dicapai dari suatu kegiatan yang berupa fisik atau non-fisik. Indikator ini digunakan untuk mengukur keluaran yang dihasilkan dari suatu kegiatan. Misalnya :

- a. Jumlah produk atau jasa yang dihasilkan.
- b. Ketepatan dalam memproduksi barang atau jasa.

4. Hasil (*Outcome*), segala sesuatu yang mencerminkan berfungsinya keluaran kegiatan pada jangka menengah (efek langsung). *Outcome* menggambarkan tingkat pencapaian atas hasil lebih tinggi yang mungkin mencakup kepentingan banyak pihak. Dengan indikator ini, organisasi/ instansi akan dapat mengetahui apakah hasil yang telah diperoleh dalam bentuk output

memang dapat dipergunakan sebagaimana mestinya dan memberikan kegunaan yang besar bagi masyarakat banyak, misalnya :

- a. Tingkat kualitas produk atau jasa yang dihasilkan.
- b. Produktivitas para karyawan atau pegawai.

5. Manfaat (*Benefit*), adalah sesuatu yang terkait dengan tujuan akhir dari pelaksanaan kegiatan. Indikator manfaat menggambarkan manfaat yang diperoleh dari indikator hasil. Misalnya :

- a. Tingkat kepuasan masyarakat.
- b. Tingkat partisipasi masyarakat.

6. Dampak (*Impact*), pengaruh yang ditimbulkan baik positif maupun negatif. Misalnya:

- a. Peningkatan kesejahteraan masyarakat.
- b. Peningkatan pendapatan masyarakat.

#### **2.1.3.4 Tingkatan Kinerja Pemerintah Daerah**

Dalam kinerja pemerintah daerah terdapat tingkatan yang dapat dilihat dari obyek dan apa yang dikerjakan, juga siapa yang bertanggungjawab mengerjakannya.

Seperti didefinisikan menurut Chabib sholeh dan Suripto (2011:17) tentang kinerja Pemerintah Daerah dapat dibagi atas :

- “1. Kinerja Kebijakan,
2. Kinerja Program, dan
3. Kinerja Kegiatan.”

Berikut penjelasan dari pernyataan diatas:

1. Kinerja Kebijakan

Kinerja kebijakan ini menjadi tanggungjawab Kepala Daerah dan DPRD, karena kedua institusi pihak yang menentukan dan mengambil kebijakan daerah. Umumnya Kepala Daerah mengajukan Rancangan Kebijakan (Peraturan Daerah) dan DPRD yang membahas dan menyetujuinya, atau sebaliknya Rancangan Peraturan Daerah lahir atas inisiatif DPRD dan Kepala Daerah yang membahas dan menyetujuinya.

## 2. Kinerja Program

Apabila kinerja kebijakan menjadi tanggungjawab Kepala Daerah dan DPRD maka, kinerja program menjadi tanggungjawab dari Kepala Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD). Sebagaimana diketahui bahwa program pada dasarnya merupakan instrument dari kebijakan dan oleh karenanya, program yang disusun untuk melaksanakan suatu kebijakan haruslah program yang sudah diperhitungkan secara matang, sehingga dengan dilaksanakan program tersebut tujuan/sasaran kebijakan akan dapat dicapai secara efektif dan efisien.

## 3. Kinerja Kegiatan

Kegiatan adalah bagian dari program, dengan demikian satu program dapat terdiri atas satu atau lebih kegiatan. Apabila Kepala Daerah dan DPRD bertanggungjawab atas benar atau salahnya suatu kebijakan dan Kepala SKPD bertanggungjawab atas tepat atau tidaknya program dan implementasinya maka, para kepala Sub Bagian, Kepala Bidang dan Kepala Urusan bertanggungjawab atas terlaksana tidaknya suatu kegiatan.

Pelaksanaan dari sejumlah kegiatan, haruslah memberikan kontribusi atas terlaksana tidaknya suatu program. Jika terdapat suatu kegiatan tidak relevan dan tidak atau hanya memberikan sedikit kontribusi terhadap pelaksanaannya suatu program maka, kegiatan tersebut perlu diubah/diganti dengan kegiatan lain yang lebih relevan dan memberikan kontribusi lebih besar terhadap hasil tidaknya pelaksanaan program.

### **2.1.3.5 Faktor Yang Mempengaruhi Kinerja Pemerintah Daerah**

Menurut A. Dale Timple dalam Jafar (2013) faktor yang mempengaruhi pencapaian kinerja adalah:

- 1.Faktor internal
- 2.Faktor eksterna

Adapun penjelasan dari faktor-faktor yang mempengaruhi kinerja instansi pemerintah yaitu sebagai berikut :

- 1.Faktor internal (disposisional) yaitu Faktor yang dihubungkan dengan sifat-sifat seseorang. Misalnya kinerja seseorang baik disebabkan karena mempunyai kemampuan tinggi dan seseorang itu tipe pekerja keras, sedangkan seseorang mempunyai kinerja jelek disebabkan orang tersebut mempunyai kemampuan rendah dan orang tersebut tidak memiliki upaya-upaya untuk memperbaiki kemampuannya.
- 2.Faktor eksternal yaitu faktor-faktor yang mempengaruhi kinerja seseorang yang berasal dari lingkungan. Seperti perilaku, sikap, dan tindakan-tindakan rekan kerja, bawahan atau pimpinan, fasilitas kerja, dan iklim organisasi

### **2.1.4 Penelitian Terdahulu**

Beberapa penelitian terdahulu yang berkaitan dengan pengaruh *Good Government Governance*, Sistem Pengendalian Internal Pemerintah, terhadap Kinerja Pemerintah Daerah diantaranya dikutip dari beberapa sumber. dapat dilihat pada Tabel 2.1

**Tabel 2.1**  
**Penelitian Terdahulu**

No	Nama Penelitian	Judul Penelitian	Hasil Penelitian
1	Mattoasi, Didiet Pratama Musue, Yaman Rauf (2018)  <a href="https://scholar.google.com/scholar?start=20&amp;q=pengaruh+good+governance+terhadap+kinerja+pemerintah&amp;hl=id&amp;as_sdt=0,5&amp;lookup=0">https://scholar.google.com/scholar?start=20&amp;q=pengaruh+good+governance+terhadap+kinerja+pemerintah&amp;hl=id&amp;as_sdt=0,5&amp;lookup=0</a>	Pengaruh Sistem Pengendalian Internal Pemerintah Terhadap Kinerja Pemerintah Daerah	-Hasil penelitian menunjukkan bahwa penerapan sistem pengendalian internal Pemerintah berpengaruh positif dan signifikan terhadap kinerja pemerintah daerah (Y) di Kabupaten Gorontalo
2	Ira Amelia dkk. (2014)  <a href="https://jurnal.unej.ac.id/index.php/JAUJ/article/view/1409">https://jurnal.unej.ac.id/index.php/JAUJ/article/view/1409</a>	Pengaruh <i>Good Governance</i> . Pengendalian Intern dan Budaya Organisasi terhadap Kinerja Pemerintah Daerah (Studi Pada Satuan Kerja Pemerintah Kab.Pelalawan)	- <i>Good Governance</i> berpengaruh signifikan terhadap Kinerja Pemerintah Daerah Kab.Pelalawang -Pengendalian Intern berpengaruh signifikan terhadap Kinerja Pemerintah Daerah Kab.Pelalawang
3	Nafi Inayanti Azahro (2016)  <a href="https://www.neliti.com/id/publications/174587/pengaruh-sistem-informasi-akuntansi-dan-pengendalian-intern-terhadap-kinerja-pem">https://www.neliti.com/id/publications/174587/pengaruh-sistem-informasi-akuntansi-dan-pengendalian-intern-terhadap-kinerja-pem</a>	Pengaruh Sistem Informasi Akuntansi dan Pengendalian Intern Terhadap Kinerja Pemerintah Daerah Kab.Kudus	Hasil penelitian berhasil membuktikan hipotesis pertama (H1). Yang menunjukkan bahwa dengan adanya SIA akan meningkatkan kinerja pemerintah daerah
4	Yuni lestari (2016)  <a href="https://onsearch.id/Record/IOS1764.article-11489?widget=1&amp;repository_id=585">https://onsearch.id/Record/IOS1764.article-11489?widget=1&amp;repository_id=585</a>	Pengaruh <i>Good Governance</i> Gaya Kepemimpinan Komitmen Organisasi dan pengendalian Intern Terhadap Kinerja Instansi Pemerintah	Kinerja pemerintah daerah, <i>good governance</i> , gaya kepemimpinan, komitmen organisasi, dan pengendalian intern dinyatakan valid.



5	<p>Muhammad Kurniawan (2013)</p> <p><a href="https://www.academia.edu/30601267/Pengaruh_Komitmen_Organisasi_Budaya_Organisasi_Dan_Kepuasan_Kerja_Terhadap_Kinerja_Organisasi_Publik_Studi_Empiris_pada_SKPD_Pemerintah_Kabupaten_Kerinci">https://www.academia.edu/30601267/Pengaruh_Komitmen_Organisasi_Budaya_Organisasi_Dan_Kepuasan_Kerja_Terhadap_Kinerja_Organisasi_Publik_Studi_Empiris_pada_SKPD_Pemerintah_Kabupaten_Kerinci</a></p>	<p>Pengaruh Komitmen Organisasi, Budaya Organisasi, dan Kepuasan Kerja terhadap Kinerja Organisasi Publik (Studi Empiris Pada SKPD Pemerintah Kabupaten Kerinci)</p>	<p>Semua variabel berpengaruh signifikan terhadap kinerja organisasi publik.</p>
6	<p>Sukma Selviany Tolley (2017)</p> <p><a href="https://www.neliti.com/id/publications/143882/pen-garuh-sistem-pengendalian-intern-pemerintah-terhadap-kinerja-satuan-kerja-per">https://www.neliti.com/id/publications/143882/pen-garuh-sistem-pengendalian-intern-pemerintah-terhadap-kinerja-satuan-kerja-per</a></p>	<p>Pengaruh Sistem Pengendalian Intern Pemerintah Terhadap Kinerja Satuan Perangkat Daerah Kabupaten Sigit</p>	<p>-pengendalian intern diperoleh hasil bahwa secara silmultan berpengaruh signifikan terhadap Kinerja Satuan Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Sigit.</p>
7	<p>Chici Charaini (2017)</p> <p><a href="https://jom.unri.ac.id/index.php/JOMFEKON/article/view/15720">https://jom.unri.ac.id/index.php/JOMFEKON/article/view/15720</a></p>	<p>Pengaruh <i>Good Governance</i>, Sistem Pengendalian Intern Pemerintah dan Gaya Kepemimpinan Terhadap Kinerja Instansi Pemerintah Daerah</p>	<p>Semua variabel berpengaruh signifikan terhadap kinerja instansi pemerintah.</p>
8	<p>Yusna (2016)</p> <p><a href="http://repository.umpalopo.ac.id/314/1/JURNAL%20201630075%20YUSNAR.pdf">http://repository.umpalopo.ac.id/314/1/JURNAL%20201630075%20YUSNAR.pdf</a></p>	<p>PENGARUH GOOD GOVERNMENT GOVERNANCE TERHADAP KINERJA PEMERINTAH DAERAH ( Studi Pada Kantor Sekretariat DPRD Kota Palopo)</p>	<p>Hasil pengujian hipotesis menunjukkan Good Government Governance terhadap Kinerja Pemerintah Daerah dengan nilai koefisien 0,187% menunjukkan bahwa penyelenggaraan pemerintahan Kota Palopo sudah berjalan dengan baik</p>

9	<p>Nafi' Inayati Zahro (2016)</p> <p><a href="https://www.neliti.com/id/publications/174587/pengaruh-sistem-informasi-akuntansi-dan-pengendalian-intern-terhadap-kinerja-pem">https://www.neliti.com/id/publications/174587/pengaruh-sistem-informasi-akuntansi-dan-pengendalian-intern-terhadap-kinerja-pem</a></p>	<p>Pengaruh Sistem Informasi Akuntansi dan Pengendalian Intern terhadap Kinerja Pemerintah Daerah Kabupaten Kudus</p>	<p>Hasil penelitian membuktikan bahwa baik Sistem Informasi Akuntansi maupun Pengendalian Intern memiliki pengaruh yang signifikan terhadap kinerja pemerintah daerah.</p>
10	<p>Ria Agustina (2021)</p> <p><a href="https://www.google.com/search?q=Pengaruh+Good+Governance,+Sistem+Pengendalian+Intern+Pemerintah+Terhadap+Kinerja+Instansi+Pemerintah+Daerah&amp;rlz=1C1CHBFenID891ID891&amp;sxsrf=APq-WBsKM4-OPn8oVoLzXNY1ks13fjji_w:1649129680694&amp;ei=0LhLYsf7KfDez7sPlbedyAU&amp;start=10&amp;sa=N&amp;ved=2ahUKEwjHo7nmvv2AhVw73MBHZVbB1kQ8NMDegQIARBQ&amp;biw=1366&amp;bih=578&amp;dpr=1#">https://www.google.com/search?q=Pengaruh+Good+Governance,+Sistem+Pengendalian+Intern+Pemerintah+Terhadap+Kinerja+Instansi+Pemerintah+Daerah&amp;rlz=1C1CHBFenID891ID891&amp;sxsrf=APq-WBsKM4-OPn8oVoLzXNY1ks13fjji_w:1649129680694&amp;ei=0LhLYsf7KfDez7sPlbedyAU&amp;start=10&amp;sa=N&amp;ved=2ahUKEwjHo7nmvv2AhVw73MBHZVbB1kQ8NMDegQIARBQ&amp;biw=1366&amp;bih=578&amp;dpr=1#</a></p>	<p>PENGARUH GOOD GOVERNMENT GOVERNANCE TERHADAP KINERJA INSTANSI PEMERINTAH (SURVEI PADA 19 SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH KABUPATEN CIANJUR)</p>	<p>Pengujian secara parsial dengan uji t mendapatkan hasil Good Government Governance positif signifikan terhadap kinerja instansi pemerintah. Hal ini menunjukkan bahwa jika good government governance baik, kinerja instansi pemerintah nya pun sudah baik.</p>

Sumber: Data diolah sendiri dari berbagai jurnal, 2021

## 2.2 Kerangka Pemikiran

### 2.1 Pengaruh *Good Government Governance* Terhadap Kinerja Pemerintah Daerah

Demi mewujudkan penyelenggaraan pemerintah yang baik maka pemerintah mencoba mewujudkan pemerintahan yang bersih dan berwibawa atau dikenal dengan istilah *good government governance*. Pemerintah sebagai pelaku utama pelaksanaan *good government governance* ini dituntut untuk memberikan pertanggungjawaban yang lebih transparan dan lebih akurat. Hal ini semakin penting untuk dilakukan dalam era reformasi ini melalui pemberdayaan peran lembaga-lembaga kontrol sebagai pengimbang kekuasaan pemerintah.

Menerapkan praktik *good government governance* dapat dilakukan secara bertahap sesuai dengan kapasitas pemerintah, masyarakat sipil dan mekanisme pasar. Salah satu pilihan startegis untuk menerapkan *good government governance* adalah melalui penyelenggaraan pelayanan publik. Peningkatan kualitas pelayanan pemerintahan daerah bagi publik sangat penting dilakukan pemerintah daerah demi tercapainya kepuasan kerja pada masyarakat.

Menurut Sedarmayanti (2012:10) :

“Terselenggaranya *good governance* merupakan prasyarat bagi setiap pemerintahan untuk mewujudkan aspirasi masyarakat dan mencapai tujuan serta cita-cita bangsa bernegara. Dalam rangka itu dirangka itu diperlukan pengembangan dan penerapan sistem pertanggung jawaban yang tepat, jelas dan legitimate, sehingga penyelenggaraan pemerintah dan pembangunana dapat berlangsung secara berdaya guna, berhasil guna, bersih dan bertanggung jawab serta bebas Korupsi Kolusi Nepotisme (KKN).”

Menurut Budi Mulyawan dalam Ira Amalia, dkk. (2014) :

“*Good government governance* merupakan wujud dari penerimaan akan pentingnya suatu perangkat peraturan atau tata kelola yang baik untuk mengatur hubungan, fungsi dan kepentingan berbagai pihak dalam urusan bisnis maupun pelayanan publik. Melaksanakan *good government governance* yang baik tentu kinerja suatu organisasi akan berjalan dengan baik dan sesuai dengan tujuan organisasi tersebut. Hal ini dapat diberikan kesimpulan bahwa apabila pelayanan *good government governance* ditingkatkan maka otomatis dapat meningkatkan kinerja organisasi.”

Menurut Nurlaela dalam Yusnar (2016)

“Penerapan tata kelola yang baik dan akuntabilitas sangat penting untuk mendukung kualitas kinerja lembaga pemerintah daerah. Kinerja lembaga pemerintah adalah pencapaian kegiatan, program atau kebijakan dalam mewujudkan visi dan misi organisasi.”

Hasil penelitian Chici Charaini (2017) menyatakan bahwa *Good government governance* berpengaruh terhadap kinerja pemerintah daerah, yang melaksanakan prinsip *good government governance* dengan baik akan memiliki kinerja yang baik juga. Sebaliknya

pemerintah yang tidak melaksanakan prinsip *good government governance* dengan baik maka, kinerja yang dimilikinya pun tidak baik.

Hasil penelitian dari Ria Agustina (2021), Yusna (2016), Yuni lestari (2016) menyatakan bahwa *good government governance* berpengaruh terhadap kinerja pemerintah daerah.

## **2.2 Pengaruh Sistem Pengendalian Intern Pemerintah Terhadap Kinerja Pemerintah Daerah**

Sistem Pengendalian Intern Pemerintah, yang selanjutnya disingkat SPIP, adalah Sistem Pengendalian Intern yang diselenggarakan secara menyeluruh di lingkungan pemerintah pusat dan pemerintah daerah.

Dalam PP No 60 Pasal 1 ayat (2) tahun 2008 menyatakan bahwa:

“Kegiatan pengendalian intern pemerintah membantu memastikan bahwa arah pimpinan instansi pemerintah dilaksanakan. Kegiatan pengendalian harus efektif dan efisien dalam pencapaian, tujuan organisasi serta sesuai dengan ukuran, kompleksitas dan sifat dari tugas dan fungsi sesuai instansi pemerintah yang sangkutan. Kegiatan pengendalian intern terdiri atas review atas kinerja instansi pemerintah yang bersangkutan”.

Rahmat Murwanto (2012:195) mengungkapkan bahwa:

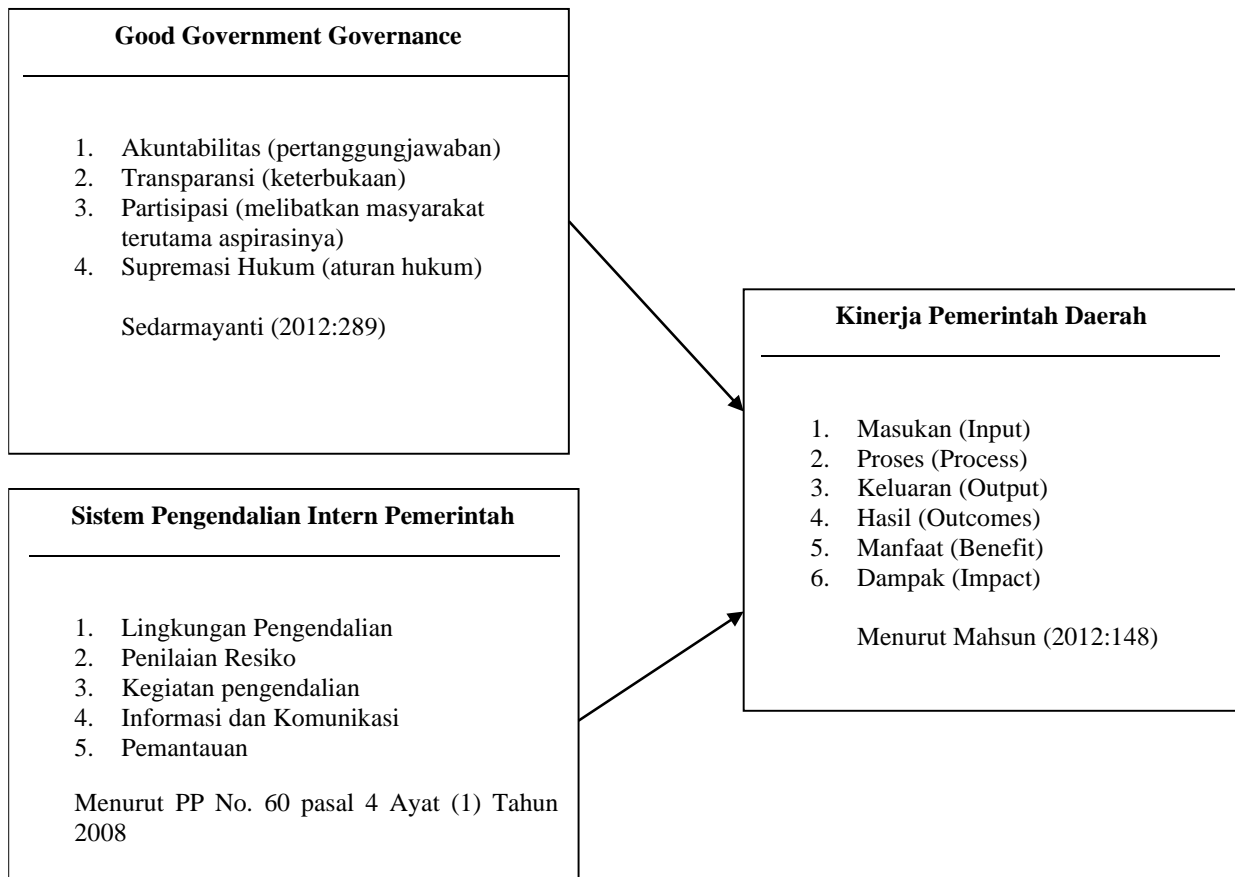
“Pengendalian intern merupakan bagian utama dalam pengelolaan suatu organisasi. Pengendalian intern terdiri dari rencana-rencana, metode-metode, dan prosedur-prosedur yang digunakan untuk mencapai visi, misi, tujuan dan sasaran organisasi sehingga mendukung suatu sistem manajemen berbasis kinerja.”

Menurut Halim dalam Lukmanul Hakim, dkk. (2016) bahwa:

“Sistem pengendalian intern merupakan faktor penting untuk meningkatkan keandalan laporan keuangan dan kinerja pemerintah, setiap entitas pelaporan dan akuntansi wajib menyelenggarakan pengendalian intern sesuai dengan peraturan perundang-undangan.”

Hasil penelitian Ira Amalian dkk (2014) menyatakan bahwa pengendalian intern berpengaruh signifikan terhadap Kinerja Pemerintah Daerah Kab.Palalawang. Hal tersebut dapat disimpulkan bahwa semakin baik dan efektif pengendalian intern yang dilaksanakan, maka kinerja pemerintah juga akan semakin baik.

Hasil penelitian dari Nafi' Inayati Zahro (2016), Sukma Selviany Tolley (2017), Muhammad Kurniawan (2013), dan Mattoasi, Didiet Pratama Musue, Yaman Rauf (2018) menyatakan bahwa pengendalian intern berpengaruh terhadap kinerja pemerintah daerah.



**Gambar 2.1**  
**Kerangka Pemikiran**

### 2.3 Hipotesis

Menurut Sugiyono (2017:93) pengertian hipotesis adalah:

“Hipotesis adalah jawaban sementara terhadap rumusan masalah penelitian, oleh karena itu rumusan masalah penelitian biasanya disusun dalam bentuk kalimat pernyataan”.

$H_1$ : Terdapat Pengaruh *Good Government Governance* terhadap Kinerja Pemerintah Daerah.

$H_2$ : Terdapat Pengaruh Sistem Pengendalian Intern Pemerintah terhadap Kinerja Pemerintah Daerah.

$H_3$ : Terdapat pengaruh *Good Government Governance* dan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah terhadap Kinerja Pemerintah Daerah.

## **BAB III**

### **METODE PENELITIAN**

#### **3.1 Metode Penelitian**

##### **3.5.1 Metode Penelitian Yang Digunakan**

Dalam melakukan suatu penelitian diperlukan metode yang sesuai sehingga dapat membantu peneliti dalam mengungkapkan permasalahan yang akan dikaji kebenarnya. Penggunaan metode penelitian mempunyai kedudukan yang sangat penting dalam pelaksanaan pengumpulan dan analisis data.

Menurut Sugiyono (2017:2) menyatakan bahwa:

“metode penelitian pada dasarnya merupakan cara ilmiah untuk mendapatkan data dengan tujuan dan kegunaan tertentu”.

Dalam melakukan penelitian perlu adanya suatu metode, cara atau taktik sebagai langkah-langkah yang harus ditempuh oleh peneliti dalam memecahkan suatu permasalahan untuk mencapai tujuan tertentu. Metode penelitian yang penulis gunakan dalam penelitian ini adalah penelitian kuantitatif dengan pendekatan metode deskriptif verifikatif.

Sugiyono (2017:8) menyatakan bahwa:

“Metode kuantitatif dapat diartikan sebagai metode penelitian yang berlandaskan pada filsafat positivisme, digunakan untuk meneliti pada populasi atau sampel tertentu, pengumpulan data menggunakan instrumen penelitian, analisis data bersifat kuantitatif/statistik, dengan tujuan untuk menguji hipotesis yang telah ditetapkan.”

Penelitian ini dilakukan langsung pada Pemda Kabupaten Subang. Agar ditemukannya fakta dari setiap variabel yang diteliti dan untuk memahami hubungan antara variabel independen dan dependen, maka data akan di analisis menggunakan uji statistik.



### **3.5.2 Objek Penelitian**

Objek penelitian merupakan sesuatu yang perlu diperhatikan dalam penelitian. Objek penelitian merupakan objek yang akan diteliti, dianalisis dan dikaji.

Menurut Sugiyono (2017:39) bahwa:

“Suatu atribut atau sifat atau nilai dari orang, objek atau kegiatan yang mempunyai variasi tertentu yang ditetapkan oleh peneliti untuk dipelajari dan kemudian ditarik kesimpulannya”.

Dalam penelitian yang penulis lakukan, Objek penelitian yang akan diteliti yaitu good government governance, sistem pengendalian intern pemerintah dan kinerja pemerintah daerah.

### **3.5.3 Unit Penelitian**

Penelitian ini akan dilakukan pada Pemda Kabupaten Subang . Hal tersebut dikarenakan peneliti ingin mengetahui apakah Pemda Kabupaten Subang telah menerapkan good government governance dengan baik, untuk mengetahui pengendalian intern pemerintah daerah telah diterapkan dengan baik dan benar mengenai dimensi kinerja pemerintah daerah.

### **3.5.4 Instrumen Penelitian**

Dalam penelitian kuantitatif, peneliti akan menggunakan instrumen untuk mengumpulkan data. Instrumen digunakan untuk mengukur nilai variabel yang diteliti. Instrumen ini memiliki peranan serta kegunaan yang sangat penting dikarenakan bila tidak mempunyai instrumen dalam mendapatkan data penelitian, maka dapat mengakibatkan salah dalam mengambil kesimpulan dalam penelitian serta mengalami kesulitan dalam melakukan pengelompokan dan pengolahan data yang relevan dalam penelitian tersebut.

Menurut Sugiyono (2017 : 102) bahwa:

“Instrumen penelitian adalah suatu alat yang digunakan mengukur fenomena alam maupun sosial yang diamati.”

Karena instrumen penelitian akan digunakan untuk melakukan pengukuran dengan tujuan menghasilkan data kuantitatif yang akurat, maka setiap instrumen harus mempunyai skala. Pada penelitian ini akan digunakan skala likert.

Menurut Sugiyono (2017 : 93) bahwa :

“Skala *Likert* digunakan untuk mengukur sikap, pendapat, dan persepsi seseorang atau sekelompok orang tentang fenomena sosial. Dalam penelitian, fenomena sosial ini telah ditetapkan secara spesifik oleh peneliti, yang selanjutnya disebut sebagai variabel penelitian.”

Dengan Skala *Likert*, maka variabel yang akan diukur dijabarkan menjadi indikator variabel. Kemudian indikator tersebut dijadikan sebagai titik tolak untuk menyusun item-item instrumen yang dapat berupa pernyataan atau pertanyaan.

### **3.5.5 Pendekatan Penelitian**

Dalam penelitian ini pendekatan yang digunakan penulis adalah metode deskriptif dan metode verifikatif.

menurut Sugiyono (2017: 147) bahwa:

“Statistik deskriptif adalah statistik yang digunakan untuk menganalisis data dengan cara mendeskripsikan atau menggambarkan data yang telah terkumpul sebagaimana adanya tanpa bermaksud membuat kesimpulan yang berlaku untuk umum atau generalisasi.”

Dalam penelitian ini, metode deskriptif digunakan untuk menjelaskan tentang pengaruh *good government governance* , pengendalian intern pemerintah daerah terhadap kinerja pemerintah daerah pada Pemda Kabupaten Subang.

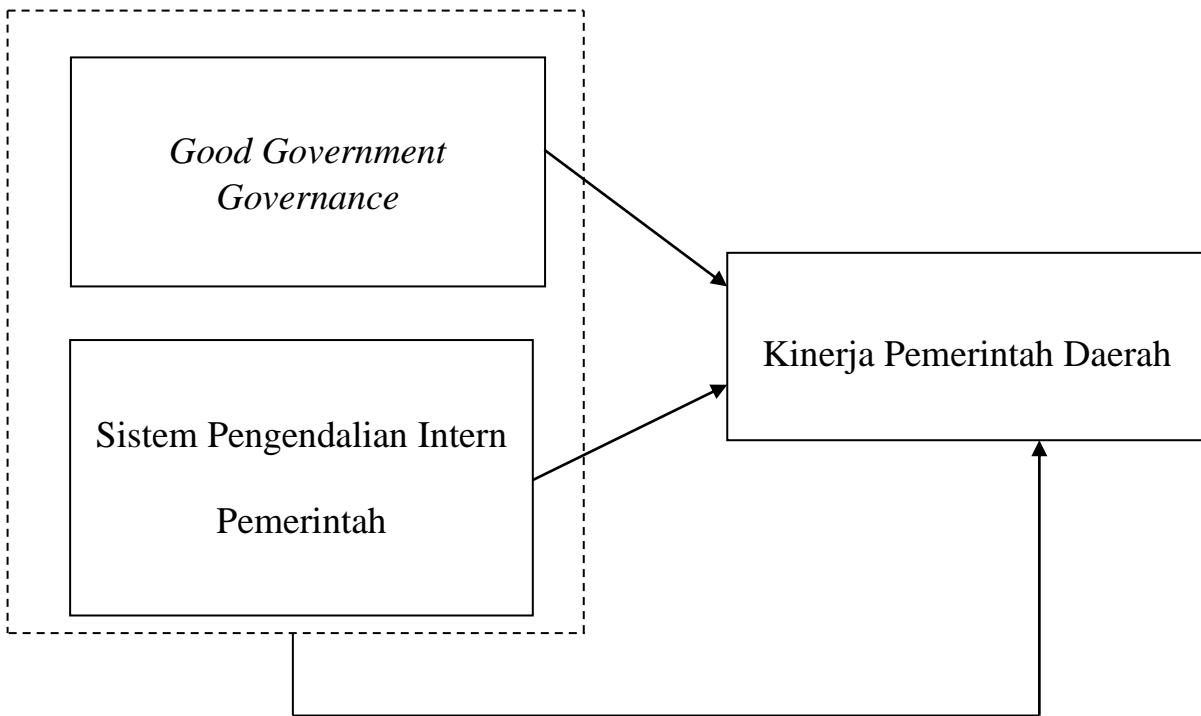
Menurut Moh. Nazir (2011:91) bahwa:

“Metode verifikatif adalah metode penelitian yang bertujuan untuk mengetahui hubungan kualitas antar variabel melalui suatu pengujian hipotesis, melalui suatu perhitungan statistik sehingga didapat hasil pembuktian yang menunjukkan hipotesis ditolak atau diterima.”

Dalam penelitian ini, metode verifikatif digunakan untuk menjelaskan tentang pengaruh good government governance , pengendalian intern pemerintah daerah terhadap kinerja pemerintah daerah pada Pemda Kabupaten Subang.

### **3.5.6 Model Penelitian**

Model penelitian ini merupakan abstraksi fenomena-fenomena yang sedang diteliti, hal ini sesuai judul skripsi “Pengaruh good government governance dan Sistem pengendalian intern pemerintah (SPIP) terhadap kinerja pemerintah daerah”. Model penelitian dapat digunakan sebagai berikut:



**Gambar 3.1**  
**Model Penelitian**

Keterangan:

- > : Uji secara Parsial
- - - - -> : Uji Secara Simultan

### 3.2 Variabel dan Operasionalisasi Variabel Penelitian

Variabel penelitian harus di definisikan dengan jelas agar tidak menimbulkan makna yang ganda. Definisi variabel juga memberi batasan sejauh mana penelitian yang akan dilakukan. Operasional variabel diperlukan untuk mengubah masalah yang diteliti ke dalam bentuk variabel. Kemudian menentukan jenis dan indikator dari variabel-variabel yang terikat.

### 3.2.1 Definisi Variabel Penelitian

Variabel merupakan sesuatu hal yang berbentuk apa saja yang ditetapkan oleh peneliti untuk dipelajari, apa yang akan diteliti oleh peneliti sehingga diperoleh informasi tentang hal tersebut, kemudian ditarik kesimpulannya.

#### Definisi Variabel Penelitian

menurut Sugiyono (2017: 38) bahwat:

“Segala sesuatu yang berbentuk apa saja yang ditetapkan oleh peneliti untuk mempelajari sehingga diperoleh informasi tentang hasil tersebut, kemudian ditarik kesimpulannya.”

Berdasarkan hubungan antara satu variabel dengan variabel lainnya dalam penelitian ini terdiri dari variabel bebas (independent variabel) dan variabel terkait (dependent variabel).

Adapun penjelasannya sebagai berikut:

#### 1. Variabel Bebas ( Independent Variable)

Menurut Sugiyono (2017: 39) :

“Variabel Independen sering disebut sebagai variabel, *stimulus, predictor, antecedent*. Dalam bahasa Indonesia sering disebut sebagai variabel bebas. Variabel bebas merupakan variabel yang mempengaruhi atau yang menjadi sebab perubahan atau timbulnya variabel dependen (terikat).”

Dalam penelitian ini, yang menjadi variabel bebas adalah *Good Government Governance* ( $X_1$ ), Pengendalian intern pemerintah ( $X_2$ ), Penjelasan kedua varibel tersebut adalah sebagai berikut

##### a. *Good Government Governance* ( $X_1$ )

menurut Sedarmayanti (2012:276) :

“*Good government governance* adalah penyelenggaraan pemerintahan negara yang solid dengan tanggung jawab, serta efektif dan efisien dengan menjaga kesinergian interaksi yang kotruktif diantara domain-domain negara sektor swasta dan masyarakat.”

b. Sistem pengendalian intern pemerintah ( $X_2$ ) menurut PP 60 Pasal 1 ayat (2) tahun 2008 mengenai Sistem Pengendalian Internal Pemerintah (SPIP) menyatakan bahwa:

“Sistem Pengendalian Intern adalah proses integral pada tindakan dan kegiatan yang dilakukan secara terus menerus oleh pimpinan dan seluruh pegawai untuk memberikan keyakinan memadai atas tercapainya tujuan organisasi melalui kegiatan yang efektif dan efisien, keandalan pelaporan keuangan, pengamanan asset negara, dan ketaatan terhadap peraturan perundang-undangan”.

## 2. Variabel Dependen atau Variabel terikat

Menurut Sugiyono (2017:39):

“Variabel dependen sering disebut variabel *output*, kriteria, konsekuen. Dalam bahasa Indonesia sering disebut sebagai variabel terikat. Variabel terikat merupakan variabel yang dipengaruhi atau yang menjadi akibat karena adanya variabel bebas”.

Pada penelitian ini yang menjadi variabel terkait adalah kinerja pemerintah daerah (Y). Menurut Mahsun (2012:25) :

“Kinerja adalah gambaran mengenai tingkat pencapaian pelaksanaan suatu kegiatan atau program atau kebijakan dalam mewujudkan sasaran tujuan, misi dan visi organisasi yang tertuang dalam strategic planning suatu organisasi.”

### 3.2.2 Operasionalisasi Variabel Penelitian

Operasionalisasi variabel diperlukan untuk menentukan jenis dari indikator dari variabel-variabel yang terikat dalam penelitian ini. Selain itu, operasionalisasi variabel

dimaksudkan untuk menentukan skala pengukuran dari masing-masing variabel, sehingga pengujian hipotesis dengan menggunakan alat bantu statistik dapat dilakukan dengan benar.

Agar lebih jelas untuk mengetahui variabel penelitian yang penulis gunakan dalam penelitian ini dapat dilihat pada tabel berikut ini:

**Tabel 3.1**  
**Operasionalisasi Variabel**  
***Good Government Governance (X<sub>1</sub>)***

Variabel	Konsep Variabel	Dimensi	Indikator	Kuesioner	Skala
<i>Good Government Governance (X<sub>1</sub>)</i>	“ <i>Good government governance</i> adalah penyelenggaraan pemerintahan negara yang solid dengan bertanggung jawab, serta efektif dan efisien dengan menjaga kesinergian interaksi yang konstruktif diantara domain-domain negara sektor swasta dan masyarakat.”  Sedarmayanti (2012:276)	1. Akuntabilitas (pertanggungjawaban)	- Aparatur pemerintah bertindak selaku penanggung jawab atas segala Tindakan yang ditetapkan - Aparatur pemerintah bertindak selaku penanggung jawab atas segala kebijakan yang ditetapkannya.	1-9	Ordinal
		2. Transparansi (keterbukaan)	- pemerintahan bersifat transparan terhadap rakyatnya - pemerintahan menyediakan informasi secara terbuka	10-13	Ordinal
		3. Partisipasi (melibatkan masyarakat terutama aspirasinya)	- Kesempatan bagi masyarakat memberikan kritik terhadap kinerja pemerintah - Kesempatan bagi masyarakat memberikan saran terhadap kinerja pemerintah  - Sarana publik untuk menyampaikan kritik dan saran yang dimiliki	14-16	Ordinal

		4. Supremasi Hukum (aturan hukum)	- Kepatuhan hukum dalam melaksanakan tata kelola pemerintahan yang baik	17-19	Ordinal
		Sedarmayanti (2012:289)	- Memberikan pelayanan dengan adil - Memberikan pelayanan sesuai dengan kebijakan yang diterapkan.		

**Tabel 3.2**  
**Operasionalisasi Variabel**  
**Sistem Pengendalian Intern pemerintah ( $X_2$ )**

Variabel	Konsep Variabel	Dimensi	Indikator	Kuesioner	Skala
Sistem Pengendalian Intern Pemerintah ( $X_2$ )	“Sistem pengendalian intern adalah proses yang integral pada tindakan dan kegiatan yang dilakukan secara terus menerus oleh pimpinan dan seluruh pegawai untuk memberikan keyakinan memadai atas tercapainya tujuan organisasi	1. Lingkungan Pengendalian	- Penegakan Integritas	1-12	Ordinal
			- Penegakan nilai etika		
			- Komitmen Terhadap Organisasi.		
			- Kepemimpinan yang kondusif.		
			- Pembentukan struktur organisasi yang sesuai dengan kebutuhan dalam penyusunan struktur organisasi harus berpedoman pada peraturan perundangundangan yang berlaku.		
			- Pendelegasian wewenang dan tanggungjawab yang tepat.		



melalui kegiatan yang efektif dan efisien, keandalan pelaporan keuangan, pengamanan aset negara, dan ketaatan terhadap peraturan perundangundangan”.		- Penyusunan dan penerapan kebijakan yang sehat tentang pembinaan sumber daya manusia.		
		- Perwujudan peran aparat pengawasan intern pemerintah yang efektif.		
		- Hubungan kerja yang baik dengan instansi pemerintah terkait		
	2. Penilaian Resiko	- Identifikasi Resiko.	13-18	Ordinal
		- Analisis Resiko.		

PP No. 60 Pasal 1 ayat (2) Tahun 2008	3. Kegiatan Pengendalian	- Review atas kinerja instansi pemerintah.	19-26	Ordinal
		- Pembinaan Sumber daya manusia.		
		- Pengendalian atas Pengelolaan sistem informasi.		
		- Pengendalian fisik dan aset		
		- Penetapan review atas indikator		
		- Pemisahan fungsi		
		- Otorisasi atas transaksi dan kejadian yang penting		
		- Pencatatan yang akurat dan tepat waktu atas transaksi dan kejadian		
		- Pembatasan akses atas sumber daya dan pencatatannya		
		- Akuntabilitas terhadap sumber daya dan pencatatannya		
		- Dokumentasi yang baik atas sistem pengendalian intern serta transaksi dan kejadian penting.		
	4. Informasi dan Komunikasi	- Pimpinan Instansi pemerintah wajib mengidentifikasi, mencatat, dan mengkomunikasikan informasi dalam bentuk dan waktu yang cepat.	27-31	Ordinal
		- Komunikasi atas informasi wajib diselenggarakan secara efektif		
- Pimpinan instansi pemerintah sekurangkurangnya harus menyediakan berbagai bentuk sarana dan komunikasi.				

			- Mengelola, mengembangkan dan memperbaharui sistem informasi secara terus menerus		
		5. Pemantauan	- Pimpinan Instansi Pemerintah wajib melakukan pemantauan sistem pengendalian intern	32-34	Ordinal
			- Pemantauan sistem pengendalian intern dilaksanakan melalui pemantauan berkelanjutan evaluasi terpisah dan tindak lanjut rekomendasi hasil audit dan review lainnya.		
			- Pemantauan berkelanjutan diselenggarakan melalui kegiatan pengelolaan rutin, supervisi, pembandingan, rekonsiliasi, dan tindakan lain yang terkait dalam pelaksanaan tugas		
			- Evaluasi terpisah diselenggarakan melalui penilaian sendiri, review dan pengujian efektivitas sistem pengendalian intern		
			- Evaluasi terpisah dapat dilakukan oleh aparat pengawasan intern pemerintah atau pihak eksternal pemerintah.		

		- Evaluasi terpisah dapat dilakukan dengan menggunakan daftar uji Pengendalian Intern	
--	--	---	--

**Tabel 3.3**  
**Operasionalisasi Variabel**  
**Kinerja Pemerintah Daerah (Y)**

Variabel	Konsep Variabel	Dimensi	Indikator	Kuesioner	Skala
Kinerja Pemerintah Daerah (Y)	“Kinerja adalah gambaran mengenai tingkat pencapaian pelaksanaan suatu kegiatan atau program atau kebijakan dalam mewujudkan sasaran tujuan, misi dan visi organisasi yang tertuang dalam <i>strategic planning</i> suatu organisasi.”	1. Masukan (Input)	- Jumlah dana yang dibutuhkan.  - Jumlah pegawai yang dibutuhkan.  - Jumlah infrastruktur yang ada  - Jumlah waktu yang digunakan.	1-7	Ordinal
		2. Proses (Process)	- Ketaatan pada peraturan perundangan.   - Rata-rata yang diperlukan untuk memproduksi atau menghasilkan layanan jasa		

		3. Keluaran (Output)	- Jumlah produk atau jasa yang dihasilkan.	12-15	Ordinal
			- Ketepatan dalam memproduksi barang atau jasa.		

	Mahsun (2012: 141)	4. Hasil (Outcome)	- Tingkat kualitas produk atau jasa yang dihasilkan.	16-17	Ordinal
			- Produktivitas para karyawan atau pegawai.		
		5. Manfaat (Benefit)	- Tingkat kepuasan masyarakat.	18-19	Ordinal
			- Tingkat partisipasi masyarakat.		
		6. Dampak (Impact)	- Peningkatan kesejahteraan masyarakat.	20-22	
		Mahsun (2012:148)	- Peningkatan pendapatan masyarakat.		

### 3.3 Populasi dan Sampel Penelitian

#### 3.3.1 Populasi

Menurut Sugiyono (2017: 80) pengertian populasi adalah:

“Populasi adalah wilayah generalisasi yang terdiri atas obyek atau subyek yang mempunyai kualitas dan karakteristik tertentu yang ditetapkan oleh peneliti untuk dipelajari dan kemudian ditarik kesimpulannya”.

Populasi sasaran adalah populasi yang akan digunakan untuk menjadi sasaran penelitian. Populasi merupakan sekumpulan objek yang mempunyai kualitas dan karakteristik tertentu yang ditentukan penelitian melalui kriteria tertentu untuk dipelajari dan kemudian ditarik kesimpulannya. Populasi terdiri dari manusia atau orang, data-data atau dokumen yang dipandang sebagai objek penelitian.

Populasi yang digunakan dalam penelitian ini adalah pegawai pada Pemda Kabupaten Subang. Adapun jumlah populasi sebagai berikut.

**Tabel 3.4**  
**Populasi Penelitian**

<b>No</b>	<b>Bagian</b>	<b>Jumlah</b>
1.	Asisten Pemerintah dan Kesra	<b>26</b>
2.	Asisten Perekonomian dan Pembangunan	<b>28</b>
3.	Asisten Administrasi Umum	<b>23</b>
4.	Staf Ahli	<b>49</b>
<b>Jumlah</b>		<b>126</b>

#### 3.3.2 Sampel

Sampel merupakan bagian dari populasi, sedangkan ukuran sampel merupakan suatu langkah menentukan besarnya sampel yang akan diambil dalam melaksanakan suatu penelitian.

Menurut Sugiyono (2017:81) sampel adalah:

“Sampel adalah bagian dari jumlah dan karakteristik yang dimiliki oleh populasi tersebut. Untuk itu sampel yang diambil dari populasi harus betul-betul representative (mewakili)”.

Untuk menentukan sampel yang akan digunakan dalam penelitian terdapat berbagai teknik sampling yang digunakan.

Menurut Sugiyono (2017:81) bahwa:

"Teknik sampling adalah merupakan teknik pengambilan sampel. Untuk menentukan sampel yang akan digunakan dalam penelitian, terdapat berbagai teknik sampling yang digunakan."

Terdapat beberapa teknik sampel yang digunakan yaitu *Probability Sampling* dan *Non probability Sampling*. Dalam menentukan sampel yang digunakan dalam penelitian ini, peneliti menggunakan teknik *Probability Sampling*.

Dalam penelitian ini peneliti menggunakan teknik sampling Teknik *probability sampling* dengan *Proportionate stratified random sampling*.

Menurut Sugiyono (2016:63) bahwa:

“*probability sampling* adalah teknik pengambilan sampel yang memberikan peluang yang sama bagi setiap unsur (anggota) populasi untuk dipilih menjadi anggota sampel”.

Menurut Sugiyono (2016,63) bahwa:

“*Proportionate stratified random sampling* adalah teknik sampling yang digunakan bila populasi mempunyai anggota/unsur yang tidak homogen dan berstrata secara proporsional”.

Untuk mengetahui jumlah sampel dalam penelitian ini dilakukan dengan menggunakan rumus slovin sebagai berikut:

$$n = \frac{N}{1 + Ne^2}$$

Keterangan:

n = jumlah sampel

N = jumlah populasi

e = error level (tingkat kesalahan)

maka, perhitungannya adalah sebagai berikut:

$$n = \frac{N}{1 + Ne^2}$$

$$n = \frac{126}{1 + 126 (0,1^2)}$$

$$n = \frac{126}{2,26}$$

$$n = 55,75$$

Berdasarkan perhitungan diatas diketahui jumlah sampel 55,75 maka akan dibulatkan untuk mempermudah analisis menjadi 56.

Sesuai dengan teknik penentuan sampel diatas, maka ukuran sampel sebesar 56 orang responden sudah mewakili populasi pegawai Kabupaten Subang. Penelitian dari sampel tersebut dapat menggambarkan karakteristik populasi, yaitu dengan cara membagikan langsung kuesioner yang harus dijawab oleh responden yang akan dijadikan sampel.



Adapun sampel yang diambil menggunakan proporsional random dengan menggunakan rumus sebagai berikut:

$$N = \frac{n_i}{S} \times n$$

Keterangan:

N : jumlah sampel tiap bagian

n : jumlah sampel

$n_i$  : jumlah populasi tiap bagian

S : jumlah total populasi

Pegawai Pemda Kabupaten Subang yang terdiri dari Asisten Pemerintah dan Kesra yang berjumlah 26, Asisten Perekonomian dan Perkembangan berjumlah 28, Asisten Administrasi dan Umum berjumlah 23 dan Staf Ahli berjumlah 49. Hasil yang didapatkan dari masing-masing proporsional random yaitu sebagai berikut:

**Tabel 3.5**  
**Sampel Penelitian**

No	Bagian	Populasi		Jumlah Sampel
1	Asisten Pemerintah dan Kesra	26	$\frac{26}{126} \times 56 = 11,5$	12
2	Asisten Perekonomian dan Pembangunan	28	$\frac{28}{126} \times 56 = 12,4$	12
3	Asisten Administrasi Umum	23	$\frac{23}{126} \times 56 = 10,2$	10
4	Staf Ahli	49	$\frac{49}{126} \times 56 = 21,7$	22
Jumlah		126		56

### **3.4 Sumber Data dan Teknik Pengumpulan Data**

#### **3.4.1 Sumber Data**

Ada dua jenis data penelitian, yaitu sumber primer dan sumber sekunder.

Menurut Sugiyono (2017;193) bahwa:

“Sumber primer adalah sumber data yang langsung memberikan data kepada pengumpul data, dan sumber sekunder merupakan sumber yang tidak langsung memberikan data kepada pengumpul data”

Di dalam penelitian ini peneliti memerlukan data yang relevan dengan permasalahan yang peneliti bahas. Sumber data yang digunakan dalam melakukan penelitian ini yaitu menggunakan data primer. Data primer tersebut bersumber dari hasil pengumpulan data berupa kuesioner dengan responden pada Pemda Kabupaten Subang yang telah ditetapkan oleh peneliti sebagai objek penelitian.

#### **3.4.2 Teknik Pengumpulan Data**

Di dalam penelitian ini peneliti memerlukan data yang relevan dengan permasalahan yang peneliti bahas. Sumber data yang digunakan dalam melakukan penelitian ini yaitu menggunakan data primer. Data primer tersebut bersumber dari hasil pengumpulan data berupa kuesioner kepada responden yaitu pada Pemda Kabupaten Subang yang telah ditetapkan oleh peneliti sebagai objek penelitian.

Jenis kuesioner yang peneliti gunakan adalah kuesioner tertutup, yaitu kuesioner yang sudah disediakan jawabannya, alasan peneliti menggunakan kuesioner tertutup karena kuesioner jenis ini memberikan kemudahan kepada responden dalam memberikan jawaban, kuesioner tertutup lebih praktis, dan dapat mengimbangi keterbatasan biaya dan waktu penelitian.

### **3.5 Metode Analisis Data dan Uji Hipotesis**

#### **3.5.1 Metode Analisis**

Analisis data yang digunakan oleh peneliti dalam penelitian ini bertujuan untuk menjawab pertanyaan yang tercantum dalam identifikasi masalah.

Menurut Sugiyono (2017:207) bahwa:

“Analisis data merupakan kegiatan setelah data dari seluruh responden atau sumber data lain terkumpul. Kegiatan dalam analisis data adalah mengelompokkan data berdasarkan variabel dan jenis responden, mentabulasi data berdasarkan variabel dari seluruh responden, menyajikan data tiap variabel yang diteliti, melakukan perhitungan untuk menjawab rumusan masalah, dan melakukan perhitungan untuk menguji hipotesis yang telah diajukan.”

Dalam metode analisis data ini peneliti mengambil analisis deskriptif.

menurut Sugiyono (2017: 147) bahwa:

“Statistik deskriptif adalah statistik yang digunakan untuk menganalisis data dengan cara mendeskripsikan atau menggambarkan data yang telah terkumpul sebagaimana adanya tanpa bermaksud membuat kesimpulan yang berlaku untuk umum atau generalisasi.”

Dalam analisis deskriptif dilakukan pembahasan mengenai rumusan sebagai berikut:

1. Bagaimana Good Government Governance pada Pemerintah Daerah Kabupaten Subang.
2. Bagaimana Sistem Pengendalian Intern Pemerintah pada Pemerintah Daerah Kabupaten Subang.
3. Bagaimana Kinerja Pemerintah Daerah pada Pemerintah Daerah Kabupaten Subang.

Dalam kegiatan menganalisis data langkah-langkah yang peneliti lakukan sebagai berikut:

a. Membuat kuesioner

Peneliti membuat kuesioner dalam bentuk pertanyaan atau pernyataan yang akan diberikan dan diisi oleh responden.

b. Membagikan dan mengumpulkan kuesioner

Daftar kuesioner di sebar ke bagian-bagian yang telah ditetapkan, setelah itu dikumpulkan kembali kuesioner tersebut yang telah diisi oleh responden.

c. Memberikan skor

Untuk menentukan nilai dari kuesioner peneliti menggunakan skala likert. Setiap item dari kuesioner memiliki 5 jawaban dengan masing-masing nilai/skor yang berbeda untuk setiap skor untuk pernyataan positif dan negatif. Untuk lebih jelasnya berikut ini kriteria bobot penilaian dari setiap pernyataan dalam kuesioner yang dijawab responden dapat dilihat pada pernyataan tabel 3.6 berikut ini.

**Tabel 3.6**  
**Bobot Penilaian Kuesioner**

No	Pilihan Jawaban	Skor
1	Selalu	5
2	Sering	4
3	Kadang-kadang	3
4	Jarang	2
5	Tidak Pernah	1

Untuk menentukan nilai dari kuesioner peneliti menggunakan skala likert, menurut Sugiyono (2017:93) bahwa:

“Skala Likert digunakan untuk mengukur sikap, pendapat, dan persepsi seseorang atau sekelompok orang tentang fenomena sosial. Dalam penelitian, fenomena sosial ini telah ditetapkan secara spesifik oleh peneliti, yang selanjutnya disebut sebagai variabel penelitian.”

Dengan skala likert dapat digunakan dalam melakukan pengukuran pada jawaban dari pertanyaan-pertanyaan yang diajukan kepada responden dengan memberikan skor pada setiap item jawaban.

d. Ketika data sudah terkumpul, kemudian dilakukan pengolahan data, disajikan dalam bentuk tabel dan dianalisis. Dalam penelitian ini peneliti menggunakan uji statistik. Untuk menilai variabel X dan Y, maka analisis yang digunakan yaitu rata-rata (mean) dari masing-masing variabel. Rumus rata-rata (mean) adalah sebagai berikut ini:

$$\text{Variabel X} = \frac{\sum xi}{n}$$

$$\text{Variabel Y} = \frac{\sum yi}{n}$$

Keterangan:

Me = Rata-rata (*mean*)

$\sum Xi$  = Jumlah nilai X ke *i* sampai ke *n*

$\sum Yi$  = Jumlah nilai Y ke *i* sampai ke *n*

n = Jumlah Responden

Mean merupakan teknik penjelasan kelompok yang didasarkan atas nilai rata-rata dari setiap variabel. Setelah mendapat mean (rata-rata), kemudian dibandingkan dengan kriteria yang peneliti tentukan berdasarkan hasil penyebaran kuesioner.

1. Untuk variabel Good Government Governance (X1) terdapat 19 pertanyaan, nilai tertinggi variabel X adalah 5 sehingga ( $5 \times 19 = 95$ ), sedangkan nilai terendah 1, maka ( $1 \times 19 = 19$ ). Kriteria untuk menilai Good Government Governance (X1) rentang

$$\frac{95-19}{5} = 15,2$$

maka penulis menentukan pedoman untuk kriteria Good Government

Governance sebagai berikut:

**Tabel 3.7**  
**Pedoman Kategorisasi**  
**Good Government Governance (X1)**

<b>Rentang Nilai</b>	<b>Kategori</b>
19-34,2	Sangat tidak baik
34,2-49,4	Tidak baik
49-64,6	Cukup baik
64,6-79,8	Baik
79,8-95	Sangat baik

2. Untuk variabel Sistem pengendalian intern pemerintah (X2 ) terdapat 34 pertanyaan, nilai tertinggi X adalah 5 sehingga (34X5 = 170) sedangkan nilai terendah 1, maka (1x34 = 34). Kriteria untuk menilai Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (X2 ) rentang  $\frac{170-34}{5} = 27,2$  maka penulis menentukan pedoman untuk kriteria Sistem

Pengendalian Intern Pemerintah (X2) sebagai berikut:

**Tabel 3.8**  
**Pedoman Kategorisasi**  
**Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (X2)**

<b>Rentang Nilai</b>	<b>Kategori</b>
34-61,2	Sangat tidak memadai
61,2-88,4	Tidak memadai
88,4-115,6	Cukup memadai
115,6-142,8	Memadai
142,8-170	Sangat memadai

3. Untuk variabel Kinerja Pemerintah Daerah (Y) terdapat 22 Pernyataan, nilai tertinggi Y adalah 5 sehingga (5x22 = 110) sedangkan nilai terendah 1, maka (1x22 = 22). Kriteria untuk menilai Kinerja Pemerintah Daerah (Y) rentang

$$\frac{110-22}{5} = 17,6$$
 maka penulis menentukan pedoman untuk kriteria Kinerja

Pemerintah Daerah (Y) sebagai berikut:

**Tabel 3.9**  
**Pedoman Kategorisasi**  
**Kinerja Pemerintah Daerah (Y)**

<b>Rentang Nilai</b>	<b>Kategori</b>
22-39,6	Sangat tidak baik
39,6-57,2	Tidak baik
74,8-74,8	Cukup baik
74,8-92,4	Baik
92,4-110	Sangat baik

### 3.5.2 Uji Validitas dan Reliabilitas

#### 3.5.7.1 Uji Validitas

Uji validitas digunakan untuk mengukur suatu data apakah data tersebut valid atau tidak. Hasil penelitian yang valid apabila terdapat kesamaan antara data yang terkumpul dengan data yang sesungguhnya.

Menurut Sugiyono (2017:121) menyatakan bahwa:

“Instrumen yang valid berarti alat ukur yang digunakan untuk mendapatkan data (mengukur) itu valid. Valid berarti instrumen tersebut dapat digunakan untuk mengukur apa yang seharusnya diukur”.

Uji validitas dalam penelitian ini digunakan analisis item yaitu mengkorelasikan skor tiap butir dengan skor total yang merupakan jumlah tiap skor butir. Jika ada item yang tidak memenuhi syarat, maka item tersebut tidak akan diteliti lebih lanjut. Syarat suatu instrumen penelitian dapat dikatakan *valid* menurut Sugiyono (2017:127) yang harus dipenuhi yaitu harus memiliki kriteria sebagai berikut:

- a. Jika  $r \geq 0,3$  maka item-item pertanyaan dari kuesioner adalah *valid*.

b. Jika  $r < 0,3$  maka item-item pertanyaan dari kuesioner adalah tidak *valid*.

Uji validitas instrumen dapat menggunakan rumus korelasi. Rumus korelasi berdasarkan *Pearson Product Moment* adalah sebagai berikut:

$$r_{xy} = \frac{n\sum XY - \sum X \sum Y}{\sqrt{\{n\sum X^2 - (\sum X)^2\}\{n\sum Y^2 - (\sum Y)^2\}}}$$

Keterangan:

$r_{xy}$  = koefisien korelasi

$\sum xy$  = jumlah perkalian variabel x dan y

$\sum x$  = jumlah nilai variabel x

$\sum y$  = jumlah nilai variabel y

$\sum x^2$  = jumlah pangkat dua nilai variabel x

$\sum y^2$  = jumlah pangkat dua nilai variabel y

n = banyaknya sampel

### 3.5.7.2 Uji Reliabilitas Instrumen

Reliabilitas adalah ketepatan hasil yang diperoleh dari suatu pengukuran. Tujuan dari uji reliabilitas adalah untuk menunjukkan konsistensi skor-skor yang diberikan skorer satu dengan skorer lainnya. Uji reliabilitas digunakan untuk mengetahui apakah alat pengumpulan data menunjukkan tingkat ketepatan, tingkat keakuratan, kestabilan atau konsistensi dalam mengungkapkan gejala tertentu.

Menurut Sugiyono (2017:121) menyatakan bahwa:

“Instrumen yang reliabel adalah instrumen yang bila digunakan beberapa kali untuk mengukur obyek yang sama, akan menghasilkan data yang sama.”



Instrumen dikatakan realibel jika alat ukur tersebut menunjukkan hasil yang konsisten, sehingga instrumen ini dapat digunakan dengan aman karena dapat bekerja sama dengan baik pada waktu dan kondisi yang berbeda. Uji reliabilitas dapat dilakukan secara bersama-sama terhadap seluruh butir pernyataan. Adapun kriteria untuk menilai reliabilitas instrumen penelitian ini sebagai berikut:

Jika nilai Alpha  $\geq 0,6$  maka instrumen bersifat reliabel.

Jika nilai Alpha  $< 0,6$  maka instrumen tidak reliabel.

Uji realibilitas dalam penelitian ini, penulis menggunakan rumus Spearman Brown menurut Sugiyono (2017:136) dengan rumus sebagai berikut:

$$r_1 = \frac{2r_b}{1 + r_b}$$

Keterangan :

$r_1$  = Realibilitas internal seluruh instrumen

$r_b$  = Korelasi product moment antara belahan pertama dan kedua

### 3.5.3 Transformasi Data Ordinal menjadi Data Interval

Data pada penelitian ini diperoleh dari jawaban kuesioner pada responden yang menggunakan skala *likert*. Dari skala pengukuran likert itu akan diperoleh data ordinal. Agar dapat dianalisis secara maka data tersebut harus dinaikan menjadi skala interval dengan menggunakan metode Methods of Successive Interval (MSI. Menurut Sambas Ali Muhidin (2011:28) langkah-langkah menggunakan *Method of Successive Interval* (MSI) bahwa:

1. Perhatikan banyaknya (frekuensi) responden yang menjawab (memberikan) respon terhadap alternative (kategori) jawaban yang tersedia.

2. Bagi setiap bilangan pada frekuensi oleh banyaknya responden (n), kemudian tentukan proporsi untuk setiap alternatif jawaban responden tersebut.
3. Jumlahkan proporsi secara berurutan sehingga keluar proporsi kumulatif untuk setiap alternatif jawaban responden.
4. Tentukan nilai Z untuk setiap kategori berdasarkan proporsi kumulatif pada setiap alternatif jawaban responden.
5. Menghitung nilai skala (scale value) untuk setiap nilai Z dengan rumus:

$$\text{Scale Value} = \frac{\text{densitas pada batas bawah} - \text{densitas pada batas atas}}{\text{are dibawah batas atas} - \text{area dibawah batas bawah}}$$

6. Melakukan transformasi nilai skala dari nilai skala ordinal ke nilai skala interval melalui persamaan berikut:

$$\text{Skor} = \text{Nilai Skala} - \text{Nilai Skala Minimum} + 1$$

### 3.5.4 Uji Asumsi Klasik

Uji asumsi klasik merupakan suatu metode yang digunakan untuk mengetahui hubungan antar variabel penelitian yang ada dalam model regresi. Sebelum melakukan uji hipotesis, pengujian ini harus dilakukan terlebih dahulu untuk mengetahui apakah data penelitian terdistribusi secara normal atau tidak. Pengujian asumsi klasik yang digunakan adalah Uji Normalitas, Uji Multikolonieritas, Uji Heteroskedastisitas

#### 1. Uji Normalitas Data

Uji normalitas digunakan untuk menguji apakah distribusi variabel terikat untuk setiap nilai variabel bebas tertentu berdistribusi normal atau tidak. Dalam model regresi linier, asumsi ini ditunjukkan oleh nilai *error* yang berdistribusi normal atau mendekati normal, sehingga layak dilakukan pengujian setara statistik. Pengujian normalitas data menggunakan *Test Normality Kolmogorov-Smirnov* dalam program SPSS. Menurut Ghazali (2016:154) mengemukakan bahwa:

“Uji normalitas bertujuan untuk menguji apakah dalam model regresi, variabel pengganggu atau residual memiliki distribusi normal. Seperti diketahui bahwa uji t dan f mengasumsikan bahwa nilai residual mengikuti distribusi normal.”

Uji normalitas dalam penelitian ini menggunakan aplikasi SPSS 21 untuk pengujian data sampel yang telah didapat melalui kuesioner untuk setiap variabel. Uji normalitas dilakukan dengan uji Kolmogorof-Smirnov (K-S), grafik histogram dan uji normal P-Plot. Menurut Singgih Santoso (2012:393), dasar pengambilan keputusan bisa dilakukan berdasarkan probabilitas yaitu:

1. Jika probabilitas  $> 0,05$  maka distribusi dari model regresi adalah normal.
2. Jika probabilitas  $< 0,05$  maka distribusi dari model regresi adalah tidak normal.

Grafik histogram dan uji normal P-Plot dapat dikatakan normal jika pola penyebarannya memiliki garis normal.

## **2. Uji Multikolinearitas**

Uji multikolonieritas bertujuan untuk menguji apakah model regresi ditemukan adanya kolerasi dalam variabel bebas (independen). Model regresi yang baik seharusnya tidak terjadi kolerasi di antara variabel independen. Jika variabel independen saling berkolerasi, maka variabel-variabel ini tidak ortogonal. Pengujian ini layak dilakukan untuk penelitian yang variabel independennya lebih dari satu. Untuk menguji ada tidaknya multikolinearitas dapat dilakukan dengan melihat *tolerance* dan *variance inflation factor* (VIF). Batas untuk *tolerance* adalah 0,10 dan batas VIF adalah 10 (Ghozali, 2016:103). Jika nilai *tolerance* lebih kecil dari 0,10 dan nilai VIF lebih besar dari 10, maka terjadi multikolinieritas.

### 3. Uji Heteroskedastisitas

Uji heteroskedastisitas bertujuan untuk menguji apakah dalam model regresi terjadi ketidaksamaan variance dari residual satu pengamatan ke pengamat lain (Ghozali, 2016:134). Jika *variance* dari residual satu pengamatan ke pengamatan yang lain tetap, maka disebut homoskedastisitas dan jika berbeda disebut heteroskedastisitas. Model regresi yang baik adalah yang homoskedastisitas atau tidak terjadi heteroskedastisitas. Untuk mendeteksi ada tidaknya heteroskedastisitas dilakukan dengan melihat ada tidaknya pola tertentu pada grafik *scatterplot* antar SRESID dan ZPRED dimana sumbu Y adalah Y yang telah diprediksi dan sumbu X adalah residual (Y prediksi – Y sesungguhnya).

Jika grafik *scatterplot* menunjukkan suatu pola titik yang bergelombang atau melebar kemudian menyempit, maka dapat disimpulkan bahwa telah terjadi heteroskedastisitas. Namun jika tidak ada pola yang tegas, serat titik-titik menyebar diatas dan dibawah angka 0 pada sumbu Y, maka tidak terjadi heteroskedastisitas.

#### 3.5.5 Analisis Regresi Linier Berganda

Regresi linier berganda yaitu suatu metode statistik umum yang digunakan untuk meneliti hubungan variabel independen (X) dengan variabel dependen (Y). Menurut Sugiyono (2017:192), persamaan analisis regresi linier berganda dapat dirumuskan sebagai berikut:

$$Y' = a + b_1X_1 + b_2X_2 + \dots + b_nX_n$$

Keterangan:

- Y' = Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan
- A = Konstanta/ nilai Y jika X = 0
- b<sub>1</sub>, b<sub>2</sub> = Koefisien arah regresi yang menyatakan perubahan nilai Y apabila terjadi perubahan nilai X
- X<sub>1</sub> = Kompetensi Sumber Daya Manusia
- X<sub>2</sub> = Sistem Akuntansi Keuangan Daerah

### 3.5.6 Uji Korelasi

Untuk menghitung keeratan hubungan atau koefisien korelasi antara variabel X dengan variabel Y, dilakukan dengan cara menggunakan perhitungan analisis koefisien korelasi *spearman's rho*. Rumusnya yaitu:

$$r_s = 1 - \frac{6 \sum_{i=1} d_i^2}{n(n^2 - 1)}$$

Keterangan:

$r_s$  = Koefisien korelasi *Rank Spearman* yang menunjukkan keeratan hubungan antara unsur-unsur variabel X dan variabel Y

$d_i$  = Selisih mutlak antara rangking data variabel X dan variabel Y ( $X_i - Y_i$ )

$n$  = Banyaknya responden atau sampel yang diteliti

Untuk dapat memberikan penafsiran terhadap koefisien korelasi yang ditemukan besar atau kecil, maka dapat disimpulkan pada ketentuan-ketentuan untuk memberikan interpretasi koefisien korelasi diantaranya yang dapat dilihat dalam tabel di bawah ini.

**Tabel 3.10**  
**Pedoman Untuk Memberikan Interpretasi**  
**Terhadap Koefisien Korelasi**

<b>Interval Koefisien</b>	<b>Tingkat Hubungan</b>
0,00 – 0,199	Sangat rendah
0,20 – 0,399	Rendah
0,40 – 0,599	Sedang
0,60 – 0,799	Kuat
0,80 – 1,000	Sangat kuat

### 3.5.7 Uji Hipotesis

Hipotesis merupakan pernyataan-pernyataan yang menggambarkan suatu hubungan antara dua variabel yang berkaitan dengan suatu kasus tertentu dan merupakan anggapan sementara yang perlu diuji kebenarannya dalam suatu penelitian. Sugiyono (2017:93) menyatakan bahwa:

“Hipotesis adalah jawaban sementara terhadap rumusan masalah penelitian biasanya disusun dalam bentuk kalimat pertanyaan. Dikatakan sementara karena jawaban yang diberikan baru didasarkan pada teori yang relevan, belum didasarkan pada fakta-fakta empiris yang diperoleh melalui pengumpulan data.”

Tujuan pengujian hipotesis untuk mengetahui apakah ada atau tidaknya pengaruh signifikan antara variabel independen terhadap variabel dependen. Untuk itu, pengujian hipotesis yang peneliti gunakan yaitu uji signifikan dengan hipotesis nol ( $H_0$ ) dan hipotesis alternatif ( $H_a$ ). Maka diajukan hipotesis sebagai jawaban sementara yang akan diuji dan dibuktikan kebenarannya. Rumusan hipotesis adalah sebagai berikut:

$H_0 : \beta_1 = 0$ , artinya *Good Government Governance* tidak berpengaruh terhadap Kinerja Pemerintah daerah.

$H_a : \beta_1 \neq 0$ , artinya *Good Government Governance* berpengaruh terhadap Kinerja pemerintah daerah.

$H_0 : \beta_2 = 0$ , artinya Sistem Pengendalian Intern Pemerintah tidak berpengaruh terhadap Kinerja pemerintah daerah.

$H_a : \beta_2 \neq 0$ , artinya Sistem Pengendalian Intern Pemerintah berpengaruh terhadap Kinerja pemerintah daerah.

### 3.5.7.1 Uji Parsial (Uji T)

Uji t berarti melakukan pengujian terhadap koefisien secara parsial. Pengujian ini dilakukan untuk mengetahui signifikansi peranan variabel independen terhadap variabel dependen diuji dengan uji-t satu, taraf kepercayaan 95%, kriteria pengambilan keputusan untuk melakukan penerimaan atau penolakan setiap hipotesis adalah dengan cara melihat signifikansi harga  $t_{hitung}$  setiap variabel independen atau membandingkan nilai  $t_{hitung}$  dengan nilai yang ada pada  $t_{tabel}$ , maka  $H_a$  diterima dan sebaiknya  $t_{hitung}$  tidak signifikan dan berada dibawah  $t_{tabel}$ , maka  $H_a$  ditolak. Adapun langkah-langkah dalam melakukan uji statistik t adalah sebagai berikut:

1. Menentukan model keputusan dengan menggunakan statistik uji t, dengan melihat asumsi sebagai berikut:
  - a. Interval keyakinan  $\alpha = 0,05$
  - b. Derajat kebebasan =  $n-k-1$
  - c. Kaidah keputusan: Tolak  $H_0$  (terima  $H_a$ ), jika  $t_{hitung} > t_{tabel}$

Terima  $H_0$  (tolak  $H_a$ ), jika  $t_{hitung} < t_{tabel}$

Apabila  $H_0$  diterima, maka dapat disimpulkan bahwa terdapat suatu pengaruh atau hubungan yang tidak positif, sedangkan apabila  $H_0$  ditolak maka pengaruh variabel independen terhadap dependen adalah signifikan.

2. Menentukan  $t_{hitung}$  dengan menggunakan statistik uji t, dengan rumus statistik:

$$t = \frac{r\sqrt{n-2}}{\sqrt{1-r^2}}$$

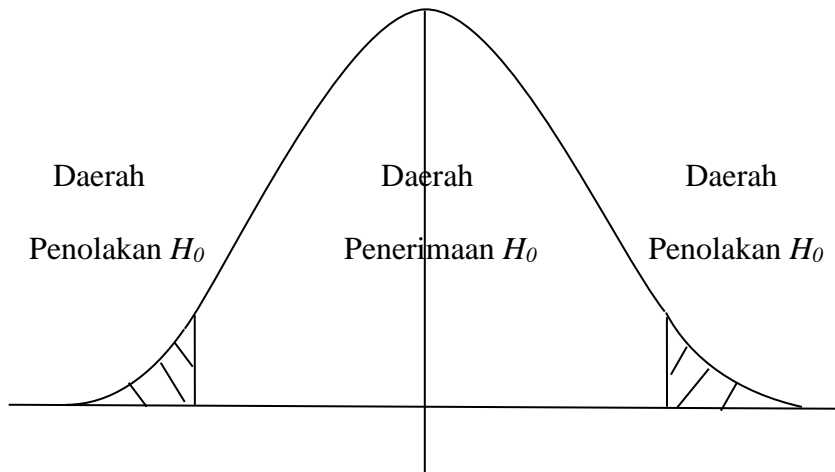
Keterangan :

$r$  = koefisien korelasi

$t$  = nilai koefisien korelasi dengan derajat bebas (dk) =  $n-k-1$

$n$  = jumlah sampel

3. Membandingkan  $t_{hitung}$  dengan  $t_{tabel}$



**Gambar 3.2 Uji T**  
(Sumber: Sugiyono 2017:185)

Distribusi t ini ditentukan oleh derajat kesalahan  $dk = n-2$ . Kriteria yang digunakan adalah sebagai berikut:

- a)  $H_0$  ditolak jika  $t_{hitung} > t_{tabel}$  atau  $-t_{hitung} < -t_{tabel}$  atau nilai Sig  $< \alpha$
- b)  $H_0$  diterima jika  $t_{hitung} < t_{tabel}$  atau  $-t_{hitung} > -t_{tabel}$  atau nilai Sig  $> \alpha$

Apabila  $H_0$  diterima, maka dapat disimpulkan bahwa pengaruhnya tidak positif, sedangkan apabila  $H_0$  ditolak maka pengaruh variabel independen terhadap dependen adalah positif. Agar lebih memudahkan peneliti dalam melakukan pengolahan data, serta agar pengukuran data yang dihasilkan lebih akurat maka peneliti menggunakan bantuan program SPSS 25.

### 3.5.7.2 Uji Simultan (Uji F)

Uji Simultan (Uji F) digunakan untuk mengetahui semua variabel independen (X) apakah mempunyai pengaruh yang sama terhadap variabel dependen (Y).



Menurut Sugiyono (2017:192) Uji F didefinisikan dengan rumus sebagai berikut:

$$F_n = \frac{R^2/k}{(1-R^2)/n-k-1}$$

Keterangan :

$F_n$  = Nilai uji f

$R$  = Koefisien korelasi berganda.

$k$  = Jumlah variabel independen

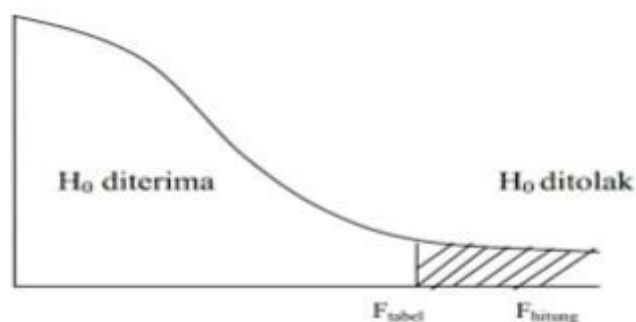
$n$  = Jumlah anggota sampel

Rumus hipotesis untuk pengujian simultan yaitu:

$H_0$  : tidak terdapat pengaruh antara *good government governance*, sistem pengendalian intern pemerintah terhadap kinerja pemerintah daerah.

$H_a$  : terdapat pengaruh antara *good government governance*, sistem pengendalian intern pemerintah terhadap kinerja pemerintah daerah.

Apabila  $H_0$  diterima maka tidak berpengaruh positif antara variabel independen terhadap variabel dependen dan apabila  $H_a$  ditolak maka variabel independen terhadap variabel dependen berpengaruh positif.



**Gambar 3.3**

**Uji F**

(Sumber: Sugiyono, 2017:187)

Kriteria yang digunakan yaitu sebagai berikut:

a.  $H_0$  ditolak jika  $F_{hitung} > F_{tabel}$

b.  $H_0$  diterima jika  $F_{hitung} < F_{tabel}$

### 3.5.7.3 Analisis Koefisien Determinasi

Analisis koefisien determinasi pada intinya mengukur seberapa jauh kemampuan model dalam menerangkan variabel-variabel dependen (Ghozali, 2016:95). Menurut Gujarati (2012:172) untuk melihat besar pengaruh dari setiap variabel bebas terhadap variabel terikat secara parsial dengan menggunakan rumus:

$$Kd = \text{Zero Order} \times \beta \times 100\%$$

Keterangan:

Kd = Koefisien determinasi

Zero Order = Koefisien Korelasi

$\beta$  = Koefisien Beta .

Nilai koefisien determinasi adalah nol dan satu nilai koefisien determinasi yang kecil berarti kemampuan variabel-variabel independen dalam menjelaskan variasi variabel dependen sangat terbatas. Nilai yang mendekati satu berarti variabel-variabel independen memberikan hampir semua informasi yang dibutuhkan untuk memprediksi variasi variabel dependen (Ghozali, 2016:95).

Menurut Sujarweni(2012:188) rumus koefisien determinasi yaitu sebagai berikut:

$$KD = R^2 \times 100\%$$

Keterangan:

KD = Nilai Koefisien Determinasi

$R^2$  = Nilai Koefisien Korelasi

### **3.5.8 Kuesioner**

Kuesioner adalah salah satu cara memberi sejumlah pernyataan atau pertanyaan tertulis kepada responden untuk dijawab. Menurut Sugiyono (2017:199) mengemukakan bahwa:

“Kuesioner merupakan teknik pengumpulan data yang dilakukan dengan cara memberi seperangkat pertanyaan atau pernyataan tertulis kepada responden untuk dijawabnya”.

Kuesioner dapat berupa pertanyaan atau pernyataan tertutup atau terbuka, dapat diberikan kepada responden secara langsung atau dikirim melalui pos atau bisa juga melalui internet. Dalam penelitian ini penulis menggunakan jenis kuesioner tertutup yaitu kuesioner yang dibagikan kepada setiap responden dengan pertanyaan yang mengharapkan jawaban singkat atau responden dapat memilih salah satu jawaban alternatif dari pertanyaan yang telah tersedia.

Berdasarkan judul penelitian, kuesioner akan dibagikan kepada masing-masing pegawai PEMDA Kabupaten Subang. Kuesioner ini terdiri dari 75 pertanyaan, yaitu 19 pertanyaan untuk Good Government Governance (X1), 34 pertanyaan untuk Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) Terhadap Kinerja Pemerintah (X2) dan 22 pertanyaan untuk Kinerja Pemerintah Daerah (Y).